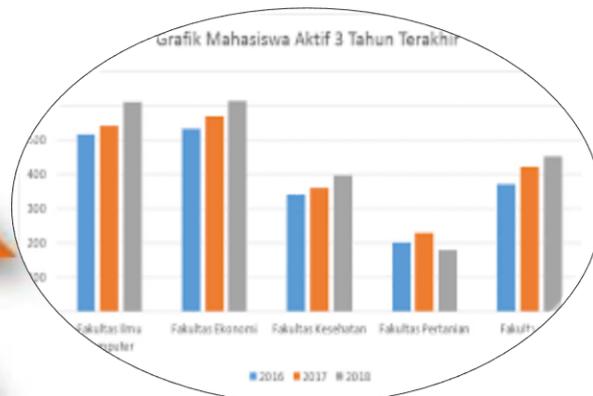




## KABUPATEN POLEWALI MANDAR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP 2022



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Dalam LAKIP ini dilaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen Renstra DP2KBP3A Tahun 2009-2024 dan Penetapan Kinerja DP2KBP3A Tahun 2022 untuk melihat sejauhmana strategi yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Kabupaten Polewali Mandar sekaligus sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan DP2KBP3A.

LAKIP ini memiliki dua fungsi utama. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja DP2KBP3A sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD DP2KBP3A Tahun 2022 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD DP2KBP3A sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.



Polewali, 01 Maret 2023

Kepala DP2KBP3A

**H. AHMAD KILANG, S.Pd.MMA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681231 198803 1 190

# Daftar Isi



## *Sampul*

<i>i</i>	<i>Kata Pengantar.....</i>	<i>i</i>
<i>ii</i>	<i>Daftar Isi .....</i>	<i>ii</i>
<i>iii</i>	<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>iv</i>
<i>vi</i>	<i>Daftar Grafik.....</i>	<i>vi</i>



## Pendahuluan

<i>1.</i>	<i>Latar Belakang.....</i>	<i>8</i>
<i>2.</i>	<i>Dasar Hukum.....</i>	<i>9</i>
<i>3.</i>	<i>Maksud dan Tujuan.....</i>	<i>9</i>
<i>4</i>	<i>Tugas, Fungsi, SOTK DP2KBP3A.....</i>	<i>10</i>



## Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunandan Penetapan Kinerja

<i>32</i>	<i>Rencana Strategis.....</i>	<i>32</i>
<i>40</i>	<i>Visi dan Misi Bupati.....</i>	<i>32</i>
<i>41</i>	<i>Rencana Kerja Tahunan 2022.....</i>	<i>35</i>
<i>41</i>	<i>Penetapan Kinerja 2022.....</i>	<i>38</i>



### Akuntabilitas Kinerja

44	<i>Akuntabilitas Kinerja.....</i>	40
78	<i>Akuntabilitas Keuangan .....</i>	74



### Penutup

# Daftar Tabel

## BAB I. PENDAHULUAN

Tabel 1.1.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Golongan, Keadaan Desember 2022.....	17
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Eselon dan fungsional, Keadaan Desember 2022.....	18
Tabel 1.3.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2022 .....	18
Tabel 1.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2022.....	19
Tabel 1.5.	Daftar Inventaris DP2KBP3A Keadaan Desember 2022.....	19
Tabel 1.6	Jumlah Tempat Pelayanan KB tahun 2022.....	23
Tabel 1.7.	Identifikasi Isu Isu Strategis Tahun 2016-2022.....	25

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1.	Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran dan Pendanaan.....	32
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM.....	33
Tabel 2.3.	Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019-2023.....	34
Tabel 2.4.	Target kinerja dan Pendanaan .....	35
Tabel 2.3.	Penetapan Kinerja DP2KBP3A 2022.....	38

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.1.	Indikator Capaian Kinerja DP2KBP3A.....	41
Tabel 3.2.	Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019–2022.....	42
Tabel 3.3.	Jumlah Kepala Keluarga menurut Pendataan Keluarga.....	43
Tabel 3.4.	Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.....	44
Tabel 3.5.	Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data yang dibentuk Tahun 2022...	45
Tabel 3.6.	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2022.....	46
Tabel 3.6.	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang belum terlayani (Unmet Need) Tahun 2019-2022.....	48

Tabel 3.7.	Jumlah Peserta KB Baru tahun 2022.....	49
Tabel 3.8.	Perkembangan jumlah Akseptor KB Baru terhadap PUS tahun 2019-2022.....	50
Tabel 3.9.	Jumlah Peserta KB MKJP tahun 2022.....	52
Tabel 3.10.	Perkembangan Peserta KB Aktif dari keluarga miskin (pra-s dan KS1 tahun 2019-2022).....	44
Tabel 3.11.	Jumlah Tenaga Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Wilayah Kerja Kabupaten Polewali Mandar 2022 .....	54
Tabel 3.11.	Frekwensi Operasional Tim KBK Kabupaten Polman Tahun 2022.....	57
Tabel 3.12	Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Tahun 2018-2022.....	59
Tabel 3.13.	Perkembangan Anggota Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Tahun 2018-2022.....	60
Tabel 3.14.	Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber-KB Tahun 2018-2022 .....	61
Tabel 3.15.	Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB menjadi anggota UPPKS Tahun 2018-2022 .....	63
Tabel. 3.16.	Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif tahun 2022.....	66
Tabel 3.17.	Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan Gender.....	67
Tabel 3.18.	Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019 – 2022 .....	67
Tabel 3.19.	Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022.....	70
Tabel 3.20.	Tingkat Kasus Kekerasan Anak tahun 2018-2022.....	71
Tabel 3.21.	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya Kualitas hidup dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak tahun 2022.....	72
Tabel 3.22	Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022 .....	69
Tabel 3.23	Akuntabilitas Keuangan menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan Gender tahun 2022.....	76

# Daftar Grafik dan Gambar

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Gambar 3.1. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Tahun 2019-2022.....	42
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur PUS Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2018–2022.....	48
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Tahun 2018–2022.....	50
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Tahun 2018–2022.....	52
Gambar 3.5. Tim KB Keliling.....	56
Gambar 3.6. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahter (UPPKA).....	62
Gambar 3.7. Pusat Informasi konseling Remaja.....	64
Gambar 3.8. Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018–2022.....	61
Gambar 3.9. Predikat Kabupaten Layak Anak.....	63
Gambar 3.10. Aspek Pemenuhan KLA.....	70
Gambar 3.11. Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak.....	70
Gambar 3.12. Grafik Kasus Kekerasan terhadap anak 2019-2022.....	71

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap aparatur pemerintah (birokrasi publik) harus dapat mempertanggungjawabkan sifat, sikap, perilaku dan kebijakannya kepada publik selama mereka menjalankan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Organisasi pemerintah dibuat oleh publik dan untuk publik, karenanya perlu mempertanggungjawabkannya kepada publik. Akuntabilitas adalah perwujudan pertanggungjawaban lembaga atas otoritas, peranan, fungsi, dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan peraturan yang berlaku maupun sebagai akibat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pemerintah, sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) salah satu instansi pemerintah di Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyusun pertanggungjawaban dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 sebagai media pertanggungjawaban mengenai kinerja DP2KBP3A sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja DP2KBP3A khususnya di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-

2024, Rencana Strategis (RENSTRA) DP2KBP3A Tahun 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja DP2KBP3A Tahun 2021 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

## **B. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2011 dan Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 adalah :

1. Untuk memaparkan pencapaian sasaran dan indikator sasaran Renstra DP2KBP3A Tahun 2019-2024;
2. Untuk memaparkan realisasi pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam penetapan kinerja DP2KBP3A tahun 2022;

3. Sebagai pembanding capaian indikator kinerja tahun sebelumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022, adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai pencapaian kinerja DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar selama satu tahun anggaran 2022;
2. Sebagai bahan evaluasi kinerja DP2KBP3A dan masukan dalam rangka perbaikan kinerja DP2KBP3A di masa yang akan datang;
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

#### **D. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas P2KBP3A**

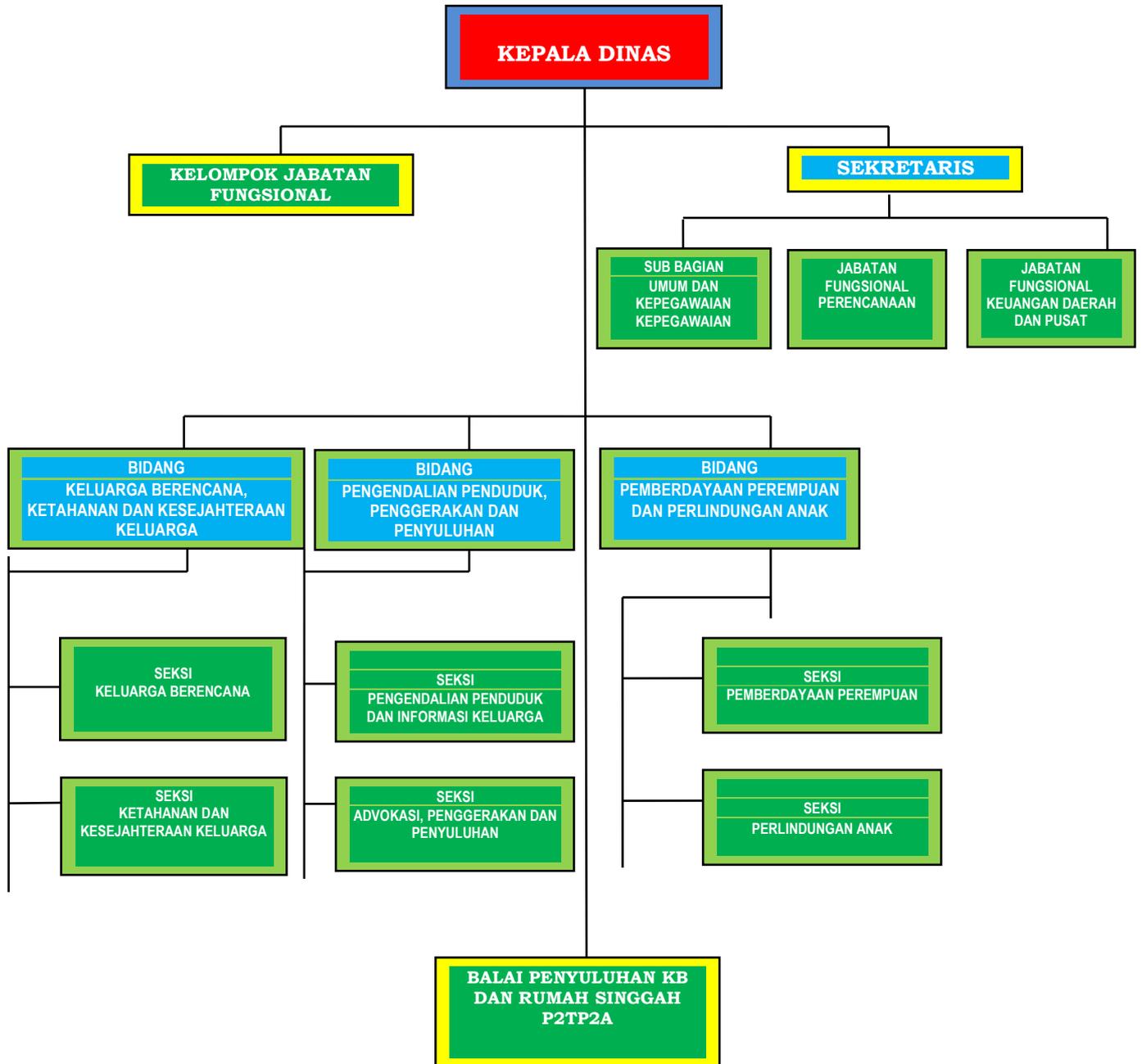
##### **Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PolewaliMandar Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, dan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 35 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah. Susunan organisasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
  1. Jabatan Fungsional Pelaporan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Jabatan Fungsional Keuangan Daerah dan Pusat
- c. Bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakkan
  1. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  2. Seksi Advokasi, KIE Penggerakkan dan Penyuluhan
- d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  1. Seksi Keluarga Berencana
  2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  1. Seksi Pemberdayaan Perempuan
  2. Seksi Perlindungan Anak
- f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar terlampir dihalaman selanjutnya:

**BAGAN  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



## **Uraian Tugas**

Uraian Tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomer 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

### **a. Tugas Pokok**

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah.

### **b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar berdasar Peraturan Bupati Polewali Mandar No. 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar pada Bab IV pasal 3 di tetapkan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

### **a. Kepala Dinas**

### **b. Sekretaris**

- 1). Jabatan Fungsional Ahli Perencanaan
- 2). Jabatan Fungsional Keuangan Daerah dan Pusat
- 3). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Peggerakan**

- 1). Seksi Pengendalian Penduduk, dan informasi Keluarga
- 2). Seksi Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan

**d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

- 1). Seksi Keluarga Berencana
- 2). Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

**e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1). Seksi Pemberdayaan Perempuan dan
- 2). Seksi Perlindungan Anak

**f. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dan P2TP2A**

**g. Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun yang menjadi Tupoksi masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

**A. Kepala Dinas**

Tugas Pokok :

- (1) Membantu Bupati memelihara dalam melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b) Pelaksanaan kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - d) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretaris**

Tugas Pokok :

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerjasi bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  - c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. Penyelenggaraan Perencanaan dan penganggaran;

- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas menyelenggarakan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - c. Penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Informasi keluarga;
  - d. Penyelenggaraan advokasi dan penggerakan dan penyuluhan;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
  - f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan koordinasi teknis Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

### **D. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargamenyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis Pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan dan fasilitasi pelayananKeluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Keluarga Berencana;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan fasilitasi pelayanan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

#### **E. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas Pokok :

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan petunjuk teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan;
  - d. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagai mana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **G. Tata Kerja**

1. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
3. Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.
4. Kepala Dinas Wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepala Dinas, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.
6. Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
7. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.
8. Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
9. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.
10. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melaukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

**E. Kondisi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)**

➤ **Sumber Daya Manusia**

Jumlah SDM Aparatur DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 21 orang yang terdiri dari :

1. 1 (Satu) orang Kepala Dinas
2. 1 (Satu) orang Sekretaris
3. 3 (Tiga) orang Kepala Bidang
  - Kepala Bidang Keluarga Berencana
  - Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
  - Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Informasi keluarga
4. 4 orang Pejabat Fungsional Ahli
  - Pejabat Fungsional Ahli Perencanaan
  - Pejabat Fungsional Ahli Keuang Daerah dan Pusat
  - 2 Orang Pejabat Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
  - 1 (Orang) Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
5. Jabatan Fungsional Umum berjumlah 12 Staf di 3 Bidang
6. 82 orang PLKB, Tetapi sejak bulan Oktober 2017 Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana beralih ke Pusat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang diurain berdasarkan Golongan Ruang, Eselon dan Fungsional, Pendidikan dan Diklat Kepemimpinan :

**Tabel 1.1**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Golongan Ruang, Keadaan Desember 2022**

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	-
II	-	3 orang	3 orang
III	2 orang	9 orang	11 orang
IV	4 orang	3 orang	7 orang
<b>Jumlah</b>	<b>6 orang</b>	<b>15 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepeg. DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

**Tabel 1.2**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Eselon dan Fungsional, Keadaan Desember 2022**

Eselon & Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II/b	1 orang	-	1 orang
III/a	1 orang	-	1 orang
III/b	1 orang	1 orang	2 orang
IV/a	-	1 orang	1 orang
JF Ahli	2 Orang	4 orang	6 orang
JFU	2 orang	8 orang	10 orang
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>	<b>15 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

**Tabel 1.3**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Pendidikan, Keadaan Desember 2022**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
SLTP	-	-	-
SLTA	-	2 orang	2 orang
D3	-	1 orang	1 orang
S1	1 orang	7 orang	8 orang
S2	5 orang	6 orang	11 orang
<b>Jumlah</b>	<b>7 orang</b>	<b>14 orang</b>	<b>21 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

**Tabel 1.4**  
**Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DP2KBP3A Menurut Jenis Kelamin**  
**Berdasarkan Diklat Kepemimpinan, Keadaan Desember 2022**

Diklat Pim	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
	Laki-Laki	Perempuan	
II	1 orang	-	1 orang
III	1 orang	1 orang	2 orang
IV	2 orang	2 orang	4 orang
<b>Jumlah</b>	<b>4 orang</b>	<b>3 orang</b>	<b>7 orang</b>

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar

➤ **Sumber Daya Sarana dan Prasarana**

Selain didukung sumber daya manusia yang memadai, DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar juga ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai yang selama ini diinventarisir dengan kondisi baik, antara lain sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 1.5**  
**Inventaris Barang DP2KBP3A, Keadaan Desember 2022**  
**BUKU INVENTARIS BARANG DP2KBP3A 2022**

No.	Nama	Tahun Pengadaan	Jumlah	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1985	1	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1987	1	Baik
3	Sepeda Motor	2008	18	Baik
4	Papan Visuil	2010	1	Baik
5	Kursi Besi/Metal	2010	2	Baik
6	Meja Panjang	2010	1	Baik
7	Kursi Putar	2010	3	Baik
8	Kursi Putar	2010	1	Baik
9	Kipas Angin	2010	1	Baik
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2010	1	Baik
11	Meja Kerja	2010	4	Baik
12	Sepeda Motor	2011	21	Baik
13	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2011	11	Baik
14	Kursi Putar	2011	1	Baik
15	Kursi Biasa	2011	29	Baik
16	Facsimile	2011	1	Baik
17	Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium	2011	1	Baik

18	Air Conditioning Unit	2012	5	Baik
19	Lemari Penyimpanan	2012	3	Baik
20	Rak Besi/Metal	2012	3	Baik
21	White Board	2012	3	Baik
22	Meja Rapat	2012	6	Baik
23	Kursi Rapat	2012	29	Baik
24	Kursi Putar	2012	8	Baik
25	Kursi Putar	2012	3	Baik
26	Kursi Biasa	2012	9	Baik
27	Meja Biro	2012	3	Baik
28	Lemari Es	2012	1	Baik
29	Kipas Angin	2012	9	Baik
30	Televisi	2012	2	Baik
31	Laptop	2012	3	Baik
32	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2012	2	Baik
33	Personal Komputer	2012	10	Baik
34	Meja Kerja	2012	16	Baik
35	Printer	2012	1	Baik
36	Dispencer	2012	1	Baik
37	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2012	3	Baik
38	Mesin Absensi	2013	1	Baik
39	Wireless	2013	1	Baik
40	Laptop	2013	1	Baik
41	Printer	2013	1	Baik
42	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	2	Baik
43	Sound System	2013	1	Baik
44	Personal Komputer	2013	17	Baik
45	Meja Kerja	2013	1	Baik
46	Meja Kerja	2013	1	Baik
47	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2013	3	Baik
48	Air Sumber Kapasitas Kecil	2013	4	Baik
49	Instalasi PLTS Kapasitas Kecil	2013	4	Baik
50	Papan Pengumuman	2014	1	Baik
51	Papan Tulis	2014	1	Baik
52	Publik Address (Lapangan)	2014	3	Baik
53	Personal Komputer	2014	1	Baik
54	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2014	3	Baik
55	Mobil Unit Penerangan	2015	1	Baik

56	Sepeda Motor	2015	6	Baik
57	Lemari Penyimpanan	2015	1	Baik
58	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	2015	1	Baik
59	Kursi Tamu	2015	1	Baik
60	Sofa	2015	1	Baik
61	AC Split	2015	1	Baik
62	Lemari Penyimpanan	2016	4	Baik
63	Lemari Penyimpanan	2016	1	Baik
64	Papan Visuil	2016	2	Baik
65	Papan Visuil	2016	1	Baik
66	Papan Visuil	2016	5	Baik
67	Kipas Angin	2016	1	Baik
68	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2016	1	Baik
69	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2016	4	Baik
70	Mini Bus 14 seat	2017	1	Baik
71	Sepeda Motor	2017	10	Baik
72	Lemari Besi	2017	1	Baik
73	P.C Unit/ Komputer PC	2017	5	Baik
74	Telephone Mobile	2017	23	Baik
75	Tempat Tidur Pasien	2017	4	Baik
76	Fire Extinghuizer	2017	1	Baik
77	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2017	2	Baik
78	Lectop	2018	2	Baik
79	Smarthpone	2018	2	Baik
80	Mobil Pengantar Alkon	2018	1	Baik
81	Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Binuang	2018	1	Baik
82	Pengadaan Box Mobil Alokon	2018	1	Baik
84	Gedung Balai Penyuluh KB Kec. Binuang	2018	1	Baik
85	Lemari	2018	1	Baik
86	Printer	2018	1	Baik
87	Layar Film/Projector	2019	10	Baik
88	Kursi Kerja	2019	1	Baik
89	Mesin Sisik Jari (Finger Print)	2019	1	Baik
90	Kursi Tamu	2019	1	Baik
91	Sepeda Motor	2020	2	Baik
92	Rak Kayu	2020	1	Baik
93	Papan Nama Instansi	2020	1	Baik

94	Personal Computer	2020	1	Baik
95	Laptop	2020	10	Baik
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020	1	Baik
97	Air Conditioning (AC)	2020	2	Baik
98	Sepeda Motor	2021	3	Baik
99	Rak Besi	2021	2	Baik
100	Lemari Kaca	2021	3	Baik
101	LCD Projector/Infocus	2021	3	Baik
102	Vacum Cleaner (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
103	Meja Kerja Kayu	2021	3	Baik
104	Kursi Rapat	2021	13	Baik
105	A.C. Split	2021	4	Baik
106	Exhaust Fan (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
107	Tangga Aluminium (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
108	Troli (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
109	Alat Pemadam/Portable (Gudang Kontrasepsi)	2021	1	Baik
110	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2021	5	Baik
111	Antena VHF/FM Stationary (Balai KB)	2021	3	Baik
112	P.C Unit	2021	3	Baik
113	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2021	4	Baik
114	Modem	2021	3	Baik
115	Wireless Access Point	2021	3	Baik
116	Pallet	2021	1	Baik
117	Laptop	2022	2	Baik
118	Sepeda Motor	2022	22	Baik
119	Komputer PC	2022	4	Baik
120	Printer	2022	4	Baik
121	Rehabilitasi balai	2022	5	Baik

Sumber : Bendahara Barang DP2KBP3A Kab.Polewali Mandar 2022

Gedung Kantor DP2KBP3A yang sekarang, digunakan sejak tahun 2012, yang berada di jalan Andi Depu No. 117 Polewali eks gedung kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. DP2KBP3A, tadinya berkantor gabung dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (2010-2011). Selain sarana gedung induk, DP2KBP3A dalam mendukung kinerja dan tugas pokoknya dilapangan, terdapat juga :

1. Balai Penyuluh KB terdiri atas Koordinator PLKB dan PLKB/PKB PNS dan Non PNS. Ada 16 unit Balai Penyuluh KB berada di 16 Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Klinik KB Pemerintah melekat di Puskesmas di setiap kecamatan dan Klinik KB Swasta, yaitu :

Klinik KB di PKM Binuang, Klinik KB di PKM Polewali, Klinik KB di PKM Pekkabata, Klinik KB di PKM Anreapi, Klinik KB di PKM Matakali, Klinik KB di PKM Pelitakan, Klinik KB di PKM Wonomulyo, Klinik KB di PKM Kebunsari, Klinik KB di PKM Mapilli, Klinik KB di PKM Batupanga, Klinik KB di PKM Campalagian, Klinik KB di PKM Katumbangan, Klinik KB di PKM Pambusuang, Klinik KB di PKM Tinambung, Klinik KB di PKM Limboro, Klinik KB di PKM Tutallu, Klinik KB di PKM Tutar, Klinik KB di PKM Matangnga, Klinik KB di PKM Bulu dan RSUD Polewali. Sedangkan Klinik KB Swasta, yaitu : Klinik KB Kemala, Klinik KB Maghfirah, Klinik KB Persit Candra Kirana, Klinik KB Mattirodeceng dan Klinik KB Mifta.

**TABLE 1.6**  
**JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB**  
**TAHUN: 2022**

Prov : SULAWESI BARAT

Kab : POLEWALI MANDAR

NO	KECAMATAN	JUMLAH TEMPAT PELAYANAN KB	JENIS TEMPAT PELAYANAN KB								
			JUMLAH FASKES	JENIS FASKES						PRAKTIK MANDIRI BIDAN (SETARA FASKES)	PUSKESDES/BIDAN MANDIRI
				RS UMUM	RS KHUSUS	KLINIK UTAMA	PUSKESMAS	KLINIK PRATAMA	RS TIPE D PRATAMA		
1	2	3=4+12+13	4=Σ(5-11)	5	6	7	8	10	11	12	13=Σ(14-17)
01	TINAMBUNG	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
02	CAMPALAGIAN	17	2	0	0	0	2	0	0	0	15
03	WONDMULYO	17	3	0	0	0	2	0	1	0	14
04	POLEWALI	12	7	1	1	1	2	2	0	0	5
05	TUTAR	13	1	0	0	0	1	0	0	0	12
06	BINUANG	14	2	0	0	0	2	0	0	0	12
07	TAPANGO	14	1	0	0	0	1	0	0	0	13
08	MAPILLI	12	1	0	0	0	1	0	0	1	10
09	MATANGNGA	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
10	LUYO	11	1	0	0	0	1	0	0	0	10
11	LIMBORO	10	1	0	0	0	1	0	0	0	9
12	BALANIPA	11	1	0	0	0	1	0	0	0	10
13	ANREAPI	6	1	0	0	0	1	0	0	0	5
14	MATAKALI	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
15	ALLU	8	1	0	0	0	1	0	0	0	7
16	BULO	9	1	0	0	0	1	0	0	0	8
<b>Jumlah Total</b>		178	26	1	1	1	20	2	1	1	151

3. Gudang Alkon, di kompleks BTN Pembangunan Berlanjut Kelurahan Madatte Kec. Polewali.
4. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Rumah Singgah yang berada di Kecamatan Matakali terdiri Pengelola, Konselor dan Tenaga Pendamping Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Kekerasan Terhadap Anak

## F. ISU STRATEGIS

Untuk melakukan suatu sistem perencanaan yang strategis, suatu organisasi perlu melakukan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada di daerah dengan metode analisis **SWOT**, yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perencanaan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama Rencana Strategi (RENSTRA) telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di DP2KBP3A yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi permasalahan pelayanan di DP2KBP3A pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan, diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar DP2KBP3A sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang masih jauh dari harapan atau belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019–2024. Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut.

Permasalahan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan suatu gambaran tentang hasil yang telah dicapai dan tentunya hal ini juga masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang menjadi penyebab/menghambat pencapaian kinerja.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka identifikasi permasalahan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar untuk setiap bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis yang telah diidentifikasi untuk menjawab pelaksanaan program KKB dan Pemberdayaan Perempuan, sebagai berikut:

#### **1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Manajemen penyediaan dan distribusi alokon;
- b. Penyediaan sarana pendukung pelayanan KB khususnya MKJP;
- c. Pendidikan kependudukan dan kesehatan reproduksi bagi remaja;
- d. Persebaran ratio PKB/PLKB di setiap Kecamatan;
- e. Pengembangan Pusat Layanan Keluarga Sejahtera

- f. Pengembangan kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS);
- g. Pemuktahiran Data Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA);
- h. Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah (DPPKBD);
- i. Penguatan dan kualitas lini lapangan (PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD, kader KB) termasuk mekanisme operasional;
- j. Sistem pencatatan pelaporan serta penyediaan data dan informasi pembangunan kependudukan dan KB;
- k. Pelatihan Bidan khususnya Bidan Swasta untuk pemasangan IUD dan Implan;
- l. Pelatihan Dokter khususnya Dokter Swasta untuk pemasangan MOW dan MOP;

**2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Penyediaan Sistem Informasi Gender dan Anak;
- b. Penyediaan tenaga ahli dalam penanganan KDRT seperti : tenaga pendamping, tenaga kesehatan, pembimbing rohani, tenaga sosial dan tenaga ahli lainnya;
- c. Advokasi tentang kesetaraan dan keadilan gender;
- d. Advokasi penganggaran responsif gender dan anak;
- e. Pendampingan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga;
- f. Sistem pencatatan pelaporan kasus kekerasan dalam rumah tangga;
- g. Pembentukan dan pengembangan forum anak;
- h. Pengembangan Kabupaten Layak Anak

**Tabel 1.7 .**

Identifikasi Isu Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2016-2022

<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN</b>		
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
<b>1</b>	Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).	Landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai dan masih ada kebijakan pembangunan sektor lain yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB  Komitmen dan dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman pemerintah daerah tentang program Bangga kencana, dan belum semua kebijakan perencanaan program dan penganggaran yang terkait dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimasukkan dalam perencanaan daerah serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB

		Koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah
2	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).	<p>Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif</p> <p>Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga kencana baik antara provinsi, antara wilayah pedesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan pengeluaran keluarga</p> <p>Pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB</p> <p>Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal</p>
3	Penguatan Data dan Informasi Kependudukan, KB dan KS	<p>Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif</p> <p>Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses pengolahan data</p> <p>Luasnya cakupan wilayah pendataan keluarga serta sulitnya akses menuju lokasi merupakan kendala sarana dan prsarana oleh para pengumpul data di lapangan</p> <p>Data sektoral memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB, namun data sektoral yang diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan dan KB, belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program Bangga kencana, dikarenakan system pengolahan data masih kurang berkualitas</p>
II	<b>BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>	
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
1	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata	Pemakaian kontrasepsi belum meningkat secara signifikan

		<p>Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) masih tinggi</p> <p>Rendahnya pengguna MKJP</p> <p>Kualitas pelayanan KB belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/ klinik pelayanan KB</p> <p>Peran Bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal</p> <p>Kualitas penyuluh KB perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan</p> <p>Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan</p>
<b>2</b>	<p>Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan</p>	<p>Masih banyaknya perkawinan usia muda, ditandai dengan median usia kawin pertama perempuan yang rendah yaitu 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria)</p> <p>Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun</p> <p>Tingginya perilaku seks pra nikah di sebagian kalangan remaja, berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi</p> <p>Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko masih rendah</p>
<b>3</b>	<p>Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan</p>	<p>Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih</p>

	<p>kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga</p>	<p>rendah</p> <p>Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah</p> <p>Kualitas hidup Lanjut Usia (Lansia) dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal</p> <p>Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p> <p>Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Disamping itu, kelompok kegiatan/Poktan, yang terdiri dari ; Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)</p> <p>Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan</p>
<b>III</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	<b>ISU STRATEGIS</b>	<b>PERMASALAHAN</b>
<b>1</b>	<p>Meningkatkan peran kelembagaan PUG dalam rangka implementasi perencanaan penganggaran responsef gender secara efektif, melalui; pendampingan teknis dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran yang rensponsif gender pada perangkat daerah, pelaksanaan</p>	<p>Peningkatan KKG dengan Fokus pada penguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG, dan pendampingan PPRG; dan Pelaksanaan pelatihan usaha dan pendampingan kepada perempuan, dikhususkan pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi</p>

	perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan Meningkatkan keterampilan perempuan dalam mendukung peningkatan kontribusi rumah tangga	
2	Memperkuat sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak melalui ketersediaan sistem data pilah gender dan anak, peningkatan kapasitas pengelola data melalui forum data	Meningkatkan sistem penyediaan, pemutahiran dan pemanfaatan data pilah gender dan anak dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM pengelola Data dan penyediaan SIGA dan infrastruktur termasuk jaringan yang optimal dengan focus Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian KLA
3	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah melalui pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif anak melalui pencapaian kabupaten Polewali Mandar sebagai kabupaten layak Anak	

### Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

- **Dinamika Internasional :**

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah sebuah agenda integritas ekonomi negara-negara ASEAN. Dalam hal ini sepuluh Negara anggota ASEAN memiliki :

- Populasi lebih dari 600 juta jiwa.
- Nilai perdagangan intra-ASEAN sekitar US\$ 600 milyar.
- Nilai perdagangan eksternal sekitar US\$ 1.800 milyar.
- Jumlah wisman diatas 35 juta orang/tahun.

Kawasan bebas perdagangan barang, modal dan jasa (12 sektor prioritas) untuk daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN. Menjadikan ASEAN sebagai basis **produksi dunia** serta menciptakan **pasar regional** bagi 575 juta jiwa penduduk ASEAN.

Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara ASEAN yang penduduknya paling banyak. Pada 2020, tercatat sebanyak lebih dari 270 juta jiwa menempati negara Indonesia.

Berdasarkan data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), berikut urutan negara dengan populasi penduduk terbanyak di Asia Tenggara pada tahun lalu.

1. Indonesia, dengan jumlah penduduk mencapai 273.523.615 jiwa
2. Filipina, dengan jumlah penduduk mencapai 109.581.078 jiwa

3. Vietnam, dengan jumlah penduduk mencapai 97.338.579 jiwa
4. Thailand, dengan jumlah penduduk mencapai 69.799.978 jiwa
5. Myanmar, dengan jumlah penduduk mencapai 54.409.80 jiwa
6. Malaysia, dengan jumlah penduduk mencapai 32.366.00 jiwa
7. Kamboja, dengan jumlah penduduk mencapai 26.718.965 jiwa
8. Laos, dengan jumlah penduduk mencapai 7.275.56 jiwa
9. Singapura, dengan jumlah penduduk mencapai 5.850.342 jiwa
10. Brunei Darussalam, dengan jumlah penduduk mencapai 437.48 jiwa

#### **Dinamika Nasional :**

- Nawacita, Sembilan program yang ingin memperkuat kemandirian ekonomi dengan cara menggerakkan ekonomi rakyat yang strategis dan memberikan perhatian kepada produk-produk Indonesia serta mendorong land-reform.

BKKBN mendukung agenda prioritas No.5 yaitu ; **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia** melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana.

- Stagnasi pencapaian program dan semakin melemahnya implementasi Program Bangga kencana di lini lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan dan atas petunjuk Bapak Presiden Republik Indonesia, maka kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis penguatan Program Bangga kencana untuk periode 2015-2019, salah satu diantaranya adalah adanya **Pembentukan Kampung KB** dalam upaya realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Program Bangga kencana secara utuh dan terintegrasi antar bidang baik internal BKKBN maupun lintas sektor di lini lapangan.

- **Dinamika Regional/ Lokal :**

- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pembangunan infrastruktur belum memadai.
- Pengembangan ekonomi kerakyatan.
- Pengelolaan sumber daya alam & lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- Reformasi birokrasi dan tata kelola.

Beberapa permasalahan di atas memberikan informasi yang cukup tentang pencapaian Program Bangga kencana di Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 5 (lima) tahun pada periode 2019-2024, dan harus dijadikan fokus dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

(memuat Latar Belakang yang menjelaskan tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan dan juga mengenai Kedudukan. Tugas Pokok dan Fungsi yang memuat penjelasan umum tentang organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi).

## **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

(memuat Rencana Strategis yang menjelaskan tentang Renstra DP2KBP3A, visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator Kinerja Utama/sasaran dalam Renstra DP2KBP3A) dan juga mengenai Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang memuat Target Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022)

## **BAB III. AKUNTABILITAS**

(Menguraikan tentang Akuntabilitas Kinerja pertujuan, persasaran dan perindikator sasaran. Dan untuk setiap indikator sasaran, dijelaskan dengan tabel atau grafik dan penjelasan memadai yaitu perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2022, membandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, menguraikan keberhasilan/kegagalan serta solusi yang dilakukan dan Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan. Dan juga penjelasan mengenai Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja)

## **BAB IV. PENUTUP**

(memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja langkah-langkah masa datang organisasi)

### **Lampiran**

- Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Pengukuran Kinerja tahun 2022
- Realisasi Anggaran Tahun 2022

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS, RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### 2.1 Perencanaan Strategis

##### 2.1.1 Rencana Strategis

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah			
Visi :			
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera			
Misi 1			
Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera dan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya taraf hidup dan kualitas sumber daya masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan	engendalian laju Pertumbuhan Penduduk  Peningkatan Kepesertaan KB aktif	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk  Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender dan Pemberdayaan Gender  Peningkatan Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten

##### 2.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-204, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Polewali Mandar tahun 2019-2024 memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut

**Tabel. 2.2**

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Urusan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi Akhir RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,92	1,02	0,92	0,82	0,82	0,82
	Persentase Peserta KB Aktif	Persen	77,63	80,99	77,63	80,99	84,27	84,27
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	92,27	92,54	92,80	92,80	93,07	93,07
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Predikat	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA	KLA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 yang menjadi salah satu pelaksana urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pelaksanaan tugasnya adalah dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditentukan oleh kementerian Dalam negeri terkait mutu pelayanan dan indikator kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>					
	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,92	1,02	0,92	0,82	0.82
	Persentase Peserta KB Aktik	77,63	80,99	77,63	80,99	84,27
2	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>					
	Indeks Pembangunan Gender	92,27	92,54	92,80	92,80	93,07
	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	KLA

## 2.1.3 Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Perkiraan Capaian	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode	
			Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar														
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	1 IPG	91.75%	606,342,600.00	92.01%	613,000,000.00	92.27%	633,000,000.00	92.54%	661,000,000.00	92.80%	684,000,000.00	93.10%	684,000,000.00	
	2 Predikat kabupaten layak anak	Pratama		Pratama		Madya		KLA		KLA				
	1 IPG	91.75%	404,808,200.00	92.01%	409,000,000.00	92.27%	422,000,000.00	92.54%	440,000,000.00	92.80%	455,000,000.00	93.10%	455,000,000.00	
Program Pemberdayaan Perempuan	1 IPG	91.75%	404,808,200.00	92.01%	409,000,000.00	92.27%	422,000,000.00	92.54%	440,000,000.00	92.80%	455,000,000.00	93.10%	455,000,000.00	
Evaluasi PUG	1 Jumlah Peserta evaluasi PUG	20 orang	27,268,200.00	25 orang	28,631,610.00	30 orang	30,063,191.00	35 orang	31,566,350.00	40 orang	33,144,668.00	40 orang	33,144,668.00	
Peningkatan peran serta OPD dalam pelaksanaan PPRG	1 Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	10 Jumlah	27,540,000.00	10 Jumlah	28,917,000.00	10 Jumlah	30,362,850.00	10 Jumlah	31,880,993.00	10 Jumlah	33,475,042.00	10 Jumlah	33,475,042.00	
Penguatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga	1 jumlah PKK yang diberdayakan	350 Jumlah	350,000,000.00	350 Jumlah	351,451,390.00	350 Jumlah	361,573,959.00	350 Jumlah	376,552,657.00	350 Jumlah	388,380,290.00	350 Jumlah	388,380,290.00	
	2 Predikat kabupaten layak anak	Pratama	201,534,400.00	Pratama	204,000,000.00	Madya	211,000,000.00	KLA	221,000,000.00	KLA	229,000,000.00	KLA	229,000,000.00	
Program Perlindungan Anak	1 Predikat kabupaten layak anak	Pratama	201,534,400.00	Pratama	204,000,000.00	Madya	211,000,000.00	KLA	221,000,000.00	KLA	229,000,000.00	KLA	229,000,000.00	
Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	1 Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang difasilitasi	35 jumlah	77,546,000.00	35 jumlah	81,423,300.00	35 jumlah	85,494,465.00	35 jumlah	89,769,188.00	35 jumlah	94,257,647.00	35 jumlah	94,257,647.00	
Pelaksanaan forum desa layak anak	1 Jumlah desa layak anak yang dilaksanakan	130 Jumlah	123,988,400.00	140 Jumlah	122,576,700.00	150 Jumlah	125,505,535.00	160 Jumlah	131,230,812.00	170 Jumlah	134,742,353.00	170 Jumlah	134,742,353.00	
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
	1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%	6,997,064,400.00	1.12%	7,070,000,000.00	1.02%	7,298,000,000.00	0.92%	7,614,000,000.00	0.82%	7,875,000,000.00	0.72%	7,875,000,000.00	
	1 Persentase peserta KB aktif	71%		74%		77.63%		80.99%		84.27%		88.27%		
	1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%	250,000,000.00	1.12%	255,000,000.00	1.02%	264,000,000.00	0.92%	276,000,000.00	0.82%	286,000,000.00	0.72%	286,000,000.00	
Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	1 Persentase Laju pertumbuhan penduduk	1.22%	250,000,000.00	1.12%	255,000,000.00	1.02%	264,000,000.00	0.92%	276,000,000.00	0.82%	286,000,000.00	0.72%	286,000,000.00	
Sosialisasi materi kependudukan sesuai dengan kearifan lokal	1 Jumlah Sosialisasi materi kependudukan yang diadakan	3 Jumlah	51,000,000.00	4 Jumlah	52,050,000.00	5 Jumlah	54,652,500.00	6 Jumlah	57,385,125.00	6 Jumlah	60,254,380.00	6 Jumlah	60,254,380.00	

Penyediaan informasi dampak kependudukan dan pengadaan media KIE	1 Jumlah jenis informasi yang disediakan	2 Jenis	14,300,000.00	2 Jenis	13,515,000.00	2 Jenis	14,190,750.00	2 Jenis	14,900,287.00	2 Jenis	15,645,310.00	2 Jenis	15,645,310.00
Pengelolaan data dan informasi program berbasis keluarga	1 Jumlah dokumen data dan informasi yang dikelola	4 Jumlah	35,200,000.00	5 Jumlah	35,460,000.00	5 Jumlah	33,483,000.00	5 Jumlah	33,957,150.00	5 Jumlah	31,855,000.00	5 Jumlah	31,855,000.00
Peningkatan kemitraan dalam pengendalian pelaksanaan program KKBP	1 jumlah mitra yang terlibat	160 Jumlah	49,500,000.00	170 Jumlah	50,475,000.00	180 Jumlah	52,998,750.00	190 Jumlah	55,648,688.00	200 Jumlah	58,431,122.00	200 Jumlah	58,431,122.00
Penyuluhan keluarga berencana bagi keluarga miskin	1 Jumlah keluarga miskin yang diberikan penyuluhan	500 jumlah	100,000,000.00	500 jumlah	103,500,000.00	500 jumlah	108,675,000.00	500 jumlah	114,108,750.00	500 jumlah	119,814,188.00	500 jumlah	119,814,188.00
	<b>1 Persentase peserta KB aktif</b>	<b>71%</b>	<b>6,747,064,400.00</b>	<b>74%</b>	<b>6,815,000,000.00</b>	<b>77.63%</b>	<b>7,034,000,000.00</b>	<b>80.99%</b>	<b>7,338,000,000.00</b>	<b>84.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>	<b>88.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>
<b>Program Keluarga Berencana</b>	<b>1 Persentase peserta KB aktif</b>	<b>71%</b>	<b>6,747,064,400.00</b>	<b>74%</b>	<b>6,815,000,000.00</b>	<b>77.63%</b>	<b>7,034,000,000.00</b>	<b>80.99%</b>	<b>7,338,000,000.00</b>	<b>84.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>	<b>88.27%</b>	<b>7,589,000,000.00</b>
Peningkatan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB	1 Jumlah PUS yang menerima layanan KB	37 jumlah	30,190,000.00	41 jumlah	31,699,500.00	45 jumlah	33,284,475.00	49 jumlah	34,948,699.00	53 jumlah	36,696,134.00	53 jumlah	36,696,134.00
Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan keluarga berencana	1 Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan KB yang disediakan	5 jenis	6,408,715,000.00	5 jenis	6,512,233,130.00	5 jenis	6,716,094,786.00	5 jenis	7,004,199,526.00	5 jenis	7,238,509,502.00	5 jenis	7,238,509,502.00
Pembinaan kader kelompok keluarga berencana	1 Jumlah kader kelompok KB yang dibina	30 Jumlah	222,853,400.00	30 Jumlah	233,996,070.00	30 Jumlah	245,695,874.00	30 Jumlah	257,980,667.00	30 Jumlah	270,879,700.00	30 Jumlah	270,879,700.00
Pembinaan ketahanan keluarga	1 Jumlah keluarga yang dibina	40 Jumlah	35,306,000.00	45 Jumlah	37,071,300.00	50 Jumlah	38,924,865.00	50 Jumlah	40,871,108.00	50 Jumlah	42,914,664.00	50 Jumlah	42,914,664.00
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder</b>	<b>Baik</b>	<b>346,800,000.00</b>	<b>Baik</b>	<b>353,900,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>400,773,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>465,913,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>519,963,000.00</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>519,963,000.00</b>
	<b>Predikat SAKIP perangkat daerah</b>	<b>B</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>BB</b>	<b>10,129,000.00</b>	<b>BB</b>	<b>10,939,000.00</b>	<b>A</b>	<b>12,079,000.00</b>	<b>A</b>	<b>13,019,000.00</b>	<b>A</b>	<b>13,019,000.00</b>
<b>Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>90%</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,129,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>10,939,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>12,079,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>13,019,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>13,019,000.00</b>
	<b>Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu</b>	<b>82%</b>		<b>86%</b>		<b>92%</b>		<b>92%</b>		<b>92%</b>		<b>100%</b>	
Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Renja / Perubahan Renja tahunan yang tersusun sesuai standar dan	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	1 jumlah	4,000,000.00	1 jumlah	4,000,000.00
Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	1 jumlah dokumen rencana kerja anggaran perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat	0 Dokumen	0.00	2 Dokumen	5,000,000.00	2 Dokumen	5,160,000.00	2 Dokumen	5,381,000.00	2 Dokumen	5,019,000.00	2 Dokumen	5,019,000.00
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0.00	0 Dokumen	5,129,000.00	0 Dokumen	5,779,000.00	0 Dokumen	6,698,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00	1 Dokumen	4,000,000.00
	<b>Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>WTP</b>	<b>-</b>	<b>WTP</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>1,934,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>2,364,000.00</b>	<b>WTP</b>	<b>2,364,000.00</b>
<b>Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyampaian SPM sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>88.89%</b>		<b>91.11%</b>		<b>93.33%</b>		<b>95.56%</b>		<b>97.78%</b>		<b>97.78%</b>	
	<b>Persentase penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>100%</b>	<b>0.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,071,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,434,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>1,934,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,364,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>2,364,000.00</b>
	<b>Persentase penyampaian Laporan Aset sesuai Standar dan Tepat Waktu</b>	<b>88.89%</b>		<b>91.11%</b>		<b>93.33%</b>		<b>95.56%</b>		<b>97.78%</b>		<b>97.78%</b>	
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	0 jumlah	0.00	1 jumlah	1,071,000.00	1 jumlah	1,434,000.00	1 jumlah	1,934,000.00	1 jumlah	2,364,000.00	1 jumlah	2,364,000.00

	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder		Baik	336,800,000.00	Baik	342,700,000.00	Sangat Baik	388,400,000.00	Sangat Baik	451,900,000.00	Sangat Baik	504,580,000.00	Sangat Baik	504,580,000.00
Program Manajemen Perkantoran	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor		65%		70%		75%		80%		85%		85%	
	Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik		75%	336,800,000.00	73%	342,700,000.00	75%	388,400,000.00	77%	451,900,000.00	80%	504,580,000.00	80%	504,580,000.00
	Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik		75%		80%		80%		85%		85%		85%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah surat masuk dan keluar yang terkelola		20 surat	21,096,000.00	20 surat	20,517,000.00	20 surat	30,775,500.00	20 surat	43,896,000.00	20 surat	45,500,000.00	20 surat	45,500,000.00
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah kebutuhan komunikasi, air dan listrik yang terpenuhi		12 Jumlah	15,900,000.00	12 Jumlah	15,900,000.00	12 Jumlah	16,818,000.00	12 Jumlah	17,540,000.00	12 Jumlah	18,200,000.00	12 Jumlah	18,200,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jumlah unit kendaraan yang dilengkapi surat izin		77 unit	18,160,000.00	73 unit	18,160,000.00	73 unit	20,353,100.00	73 unit	21,228,000.00	73 unit	29,000,000.00	73 unit	29,000,000.00
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Luas gedung dan halaman kantor kondisi bersih		2 Jenis	12,561,200.00	2 Jenis	11,956,500.00	2 Jenis	12,550,000.00	2 Jenis	13,100,000.00	2 Jenis	13,558,500.00	2 Jenis	13,558,500.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia		40 jenis	17,746,400.00	40 jenis	17,746,400.00	40 jenis	18,000,000.00	40 jenis	18,774,000.00	40 jenis	26,500,000.00	40 jenis	26,500,000.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang tersedia		3 jenis	14,629,400.00	3 jenis	14,629,400.00	3 jenis	17,500,000.00	3 jenis	20,450,000.00	3 jenis	24,500,000.00	3 jenis	24,500,000.00
Penyediaan Makanan dan Minuman	1 jumlah makan minum yang tersedia		2 Jenis	42,300,000.00	2 Jenis	42,300,000.00	2 Jenis	46,530,000.00	2 Jenis	51,400,000.00	2 Jenis	61,000,000.00	2 Jenis	61,000,000.00
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 jumlah laporan koordinasi dan konsultasi luar daerah		21 kali	94,272,800.00	20 kali	105,897,000.00	29 kali	128,585,400.00	30 kali	130,682,200.00	33 kali	132,133,250.00	33 kali	132,133,250.00
Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah		22 kali	8,900,000.00	25 kali	8,900,000.00	30 kali	9,300,000.00	35 kali	10,350,000.00	40 kali	14,000,000.00	40 kali	14,000,000.00
Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	1 Jumlah unit komputer PC/notebook		0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	2 jumlah	17,815,800.00	2 jumlah	17,815,800.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Luas bangunan dan halaman kantor yang terpelihara		42 meter	18,723,200.00	42 meter	18,137,000.00	0 meter	0.00	42 meter	20,000,000.00	42 meter	20,700,000.00	42 meter	20,700,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara		2 jenis	62,371,000.00	2 jenis	61,916,700.00	2 jenis	64,085,000.00	2 jenis	67,000,000.00	2 jenis	70,500,000.00	2 jenis	70,500,000.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah jenis peralatan yang terpelihara		0 jumlah	0.00	0 jumlah	0.00	6 jumlah	3,780,000.00	6 jumlah	3,969,000.00	6 jumlah	4,167,450.00	6 jumlah	4,167,450.00
Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	1 Jumlah jenis layanan yang terkelola		3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,640,000.00	3 jenis	6,925,500.00	3 jenis	7,200,000.00	3 jenis	7,200,000.00

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi/unit kerja yang menerima amanah dengan pihak yang memberi amanah. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Tahun 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,**  
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN**  
**POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2021	TARGET2022
1	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Persentase laju pertumbuhan penduduk	1.12%	0.92%
2	Meningkatnya kapasitas keluarga sejahtera	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	51.80	51.50
3	Meningkatnya keberdayaan perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.01	92.54
4	Meningkatnya kualitas pemenuhan hak anak	Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Nindya
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,488,298,273	DAU
2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 7,408,297,000	DAK
3	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 180,000,000	DAU
4	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 224,240,000	DAU
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 10,300,835,273</b>	<b>DAU/DAK</b>

Pihak Kedua,  
BUPATI POLEWALI MANDAR,



**H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS P2KBP3A,



**H. AHMAD KILANG, S.Pd, MMA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19681231 198803 1 190

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi. LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/ tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Polewali Mandar tahun 2020 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2019-2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi DP2KBP3A.

#### **A. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dengan target yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Kemudian, atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator sasaran strategis, faktor-faktor yang mendukung pencapaian kinerja dan penyebab tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

##### **1. Sasaran 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Penduduk sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2022. Indikator kinerja sasaran beserta target,

realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.1**  
**Indikator Capaian Kinerja Terkendalinya DP2KBP3A**

NO	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
1	2	3	4	5
1	Presentase Laju Pertumbuhan Penduduk	0,92%	1,85%	201%
2	Presentase peserta KB aktif	80,99%	49,59%	61,22%
3	Indeks Pembangunan Gender	92,54	91,56%	9,15%
4	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama
5	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Baik	Baik	Baik
6	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
7	Opini Pengelolaan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP

Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran nomor 1 adalah bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan dan Penggerakan sedangkan sasaran nomor 2 adalah bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan. Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran terkendalinya laju pertumbuhan penduduk adalah sebagai berikut :

#### 1. Sosialisasi materi kependudukan yang diadakan di SSK

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah Sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran dimana didalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana

Materi Kependudukan Diintegrasikan Dengan Mata Pelajaran Sesuai Dengan Pokok Bahasan Sehingga Bukan Mata Pelajaran Baru, Tidak Menambah Jam Pelajaran, Tidak Mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar Namun Justru Mempertajam Materi Yang Dibahas Program SSK Menjadi Wadah Bagi Program-program Yang Digulirkan Bkkbn Seperti Pik Remaja, Genre Goes To School, Dan Lain-lain. Sehingga Dapat Berjalan Berdampingan Dan Simultan

Program SSK Berbasis Kurikulum Nasional Sehingga Tidak Akan Ada Perbedaan Karakteristik Wilayah Baik Secara Geografis maupun Administratif Program SSK bersifat gradual karena meliputi beberapa bidang studi sesuai dengan pokok bahasan pada mata pelajaran tersebut sehingga akan terus menerus mengalami pengembangan Program SSK ini akan konsisten karena akan terus dilaksanakan selama mata pelajaran dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum

Data Kependudukan yang diobservasi, dikumpulkan, diolah, dianalisis, dan dikomunikasikan oleh para siswa adalah data kependudukan tempat tinggal para siswa sendiri sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggungjawab terhadap kondisi

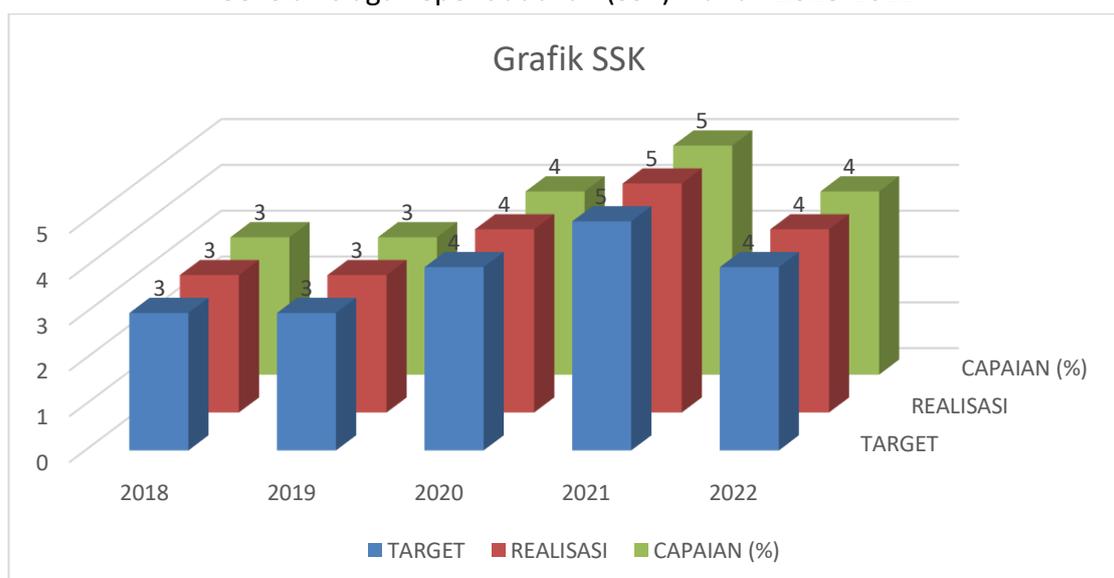
kependudukan di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini dilaksanakan semenjak tahun 2019.

Jumlah Sekolah Siaga Kependudukan yang sudah tersosialisasi pada tahun 2022 sebanyak 4 sekolah sementara di tahun sebelumnya 2019 sebanyak 3 dan tahun 2020 sebanyak 4 sekolah, tahun 2021 sebanyak 5 sekolah dan di tahun 2022 hanya nbisa direalisasikan 4 sekolah karena faktor anggaran yang minim. Terkait dengan indicator ini perkembangan dan realisasi cakupan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tahun 2018 dan 2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

**Tabel 3.2**  
Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah siaga kependudukan Tahun 2018-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	3 SSK	3 SSK	100%
2019	3 SSK	3 SSK	100%
2020	4 SSK	4 SSK	100%
2021	5 SSK	5 SSK	100%
2022	4 SSK	4 SSK	100%

**Gambar 3.1**  
Grafik Perkembangan Perkembangan Target dan Realisasi Jumlah Sekolah siaga kependudukan (SSK) Tahun 2018-2022



## 2. Informasi dampak kependudukan dan pengadaan media KIE

Informasi dampak kependudukan adalah informasi mengenai Perubahan jumlah penduduk ini ditentukan oleh komponen-komponen kependudukan, seperti kelahiran, kematian dan

migrasi. Pertumbuhan penduduk yang terus menerus ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Penduduk besar akan memberikan dampak positif jika SDM-nya berkualitas, tetapi akan berdampak negatif kalau penduduk tidak berkualitas, sehingga menjadi beban pembangunan

**Tabel 3.3**

**JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI MENURUT KELOMPOK UMUR  
PENDATAAN KELUARGA INDONESIA**

PERIODE: 2022

WILAYAH: Kabupaten Polewali Mandar

KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI	KELOMPOK UMUR											
			< 15	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	TINAMBUNG	4,664	0	12	137	354	555	608	599	618	522	439	316	504
02	CAMPALAGIAN	10,799	1	28	298	794	1,222	1,386	1,420	1,486	1,441	869	645	1,209
03	WONOMULYO	9,238	0	21	273	704	1,007	1,192	1,307	1,318	1,152	783	565	916
04	POLEWALI	8,790	0	25	188	623	1,010	1,263	1,305	1,156	1,078	773	539	830
05	TUTAR	3,659	0	25	194	391	506	559	548	503	386	204	164	179
06	BINUANG	5,625	1	12	133	453	791	836	856	772	694	420	231	426
07	TAPANGO	5,440	0	23	231	500	700	760	812	785	580	358	286	405
08	MAPILLI	6,036	1	27	229	550	742	790	855	810	714	430	325	563
09	MATANGNGA	1,134	0	5	80	104	142	175	183	157	111	78	35	64
10	LUYO	6,214	1	17	228	587	759	824	793	897	726	482	354	546
11	LIMBORO	3,766	0	17	126	299	388	439	407	539	486	318	271	476
12	BALANIPA	5,591	1	44	218	522	683	773	701	750	622	469	289	519
13	ANREAPI	2,199	0	8	88	171	283	327	314	304	248	160	109	187
14	MATAKALI	4,977	1	11	176	414	626	689	740	711	536	367	293	413
15	ALLU	2,810	3	13	86	221	266	332	369	432	375	208	169	336
16	BULO	1,812	1	12	119	187	270	250	256	261	189	116	64	87
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>82,754</b>	<b>10</b>	<b>300</b>	<b>2,804</b>	<b>6,874</b>	<b>9,950</b>	<b>11,203</b>	<b>11,465</b>	<b>11,499</b>	<b>9,860</b>	<b>6,474</b>	<b>4,655</b>	<b>7,660</b>

Sumber: Pendataan Keluarga; Tanggal dan Jam laporan diambil/download

**3. Dokumen data dan Informasi yang dikelola**

Dokumen data dan informasi yang di kelola meliputi :

- Angka kelahiran total Kabupaten
- Angka Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Usia Subur
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- Angka kebutuhan KB PUS yang belum termenuhi (Unmet need) seluruh Kabupaten Polewali mandar
- Angka pemakaian KB cara modern menurut karakteristik latar belakang di Kabupaten Polewali mandar
- Angka PUS Kabupaten Polewali mandar
- Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) Kabupaten Polewali mandar
- Angka peserta KB Aktif seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Angka peserta KB Baru per mix kontrasepsi seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- Presentase peserta KB Aktis MKJP Kabupaten Polewali mandar
- Tren Angka PUS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar

- l. Tren pencapaian peserta KB Baru seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- m. Tren peserta KB Aktif MKJP seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- n. Tren Unmet Need Kabupaten Polewali mandar
- o. Data Basis kelompok BKB seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- p. Data Basis kelompok BKB HI se- Kabupaten Polewali mandar
- q. Data Basis kelompok BKR seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- r. Data Basis kelompok BKL seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- s. Data Basis kelompok UPPKS seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- t. Data Basis kelompok PIK R seluruh wilayah Kabupaten Polewali mandar
- u. Jumlah Kelompok Tribina dan PIK R
- v. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan atap terluas
- w. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan dinding rumah terluas
- x. Jumlah Keluarga berdasarkan indicator perumahan lantai rumah terluas
- y. Angka Kelahiran per kelompok umur (ASFR)
- z. Presentasi Angka ketidak berlangsungan pemakaian kontrasepsi Kabupaten Polewali mandar
- aa. Data PKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- bb. Data PLKB ASN Kabupaten Polewali mandar
- cc. Data Kampung KB Kabupaten Polewali mandar

#### 4. Jumlah Mitra yang terlibat dalam Program Bangga Kencana (KKBPK)

Tabel 3.4

Gambaran Umum Petugas PPKBD dan Sub PPKBD  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

##### Keadaan Umum

NO	URAIAN	JUMLAH YANG ADA	JUMLAH LAPOR
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan	16	16
2	PPLKB / Petugas KB Kecamatan	19	19
3	Desa/Kelurahan	167	167
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	22	22
5	P P K B D	167	167
6	Sub P P K B D	728	728
7	Kelompok KB	66	66
8	Kelompok Kegiatan BKB	98	98
9	Kelompok Kegiatan BKR	17	17
10	Kelompok Kegiatan BKL	33	33
11	Kelompok Kegiatan UPPKA	49	49
12	Jumlah PIK R/M	25	25
	a. Jumlah PIK R/M Tumbuh	23	23

	b. Jumlah PIK R/M Tumbuh	2	2
	c. Jumlah PIK R/M Tumbuh	0	0

**Tabel 3.5**

Daftar Nama Kampung KB dan Rumah Data  
yang dibentuk Tahun 2022

**5. Jumlah Rumah Data Kampung KB yang dibentuk**

NO	NAMA KAMPUNG KB	KECAMATAN	RUMAH DATA
1	Polewali	Polewali	Ada
2	Takatindung	Polewali	
3	Madatte	Polewali	
4	Manding	Polewali	Ada
5	Sulewattang	Polewali	
6	Tonyaman	Binuang	Ada
7	Kunyi	Anreapi	Ada
8	Duampanua	Anreapi	Ada
9	Tonrolima	Matakali	Ada
10	Bunga bunga	Matakali	Ada
11	Indo Makombong	Matakali	Ada
12	Patampanua	Matakali	Ada
13	Tumpiling	Wonomulyo	Ada
14	Nepo	Wonomulyo	
15	Sidorejo	Wonomulyo	Ada
16	Jambu Malea	Tapango	Ada
17	Bussu	Tapango	
18	Buku	Mapili	
19	Sattoko	Mapili	
20	Kurma	Mapili	
21	Pulliwa	Bulo	Ada
22	Mambu Tapua	Matangnga	
23	Tapua	Matangnga	Ada
24	Taramanu	Tutar	
25	Taramanu Tua	Tutar	
26	Arabua	Tutar	Ada
27	Puccadi	Luyo	
28	Tenggelang	Luyo	
29	Luyo	Luyo	
30	Sumarrang	Campalagian	Ada
31	Kenje	Campalagian	Ada
32	Katumbangan Lemo	Campalagian	Ada
33	Padang Timur	Campalagian	Ada
34	Sabang subik	Balanipa	Ada
35	Lambanan	Balanipa	
36	Pambusuang	Balanipa	

37	Bala	Balanipa	Ada
38	Lego	Balanipa	Ada
39	Lekopadis	Tinambung	
40	Tangnga Tangga	Tinambung	
41	Sepabatu	Tinambung	Ada
42	Salarri	Limboro	Ada
43	Tangan Baru	Limboro	Ada
44	Sama sundu	Limboro	Ada
45	Alu	Alu	

## 2. Sasaran 2 : PRESENTASE PESERTA KB AKTIF

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

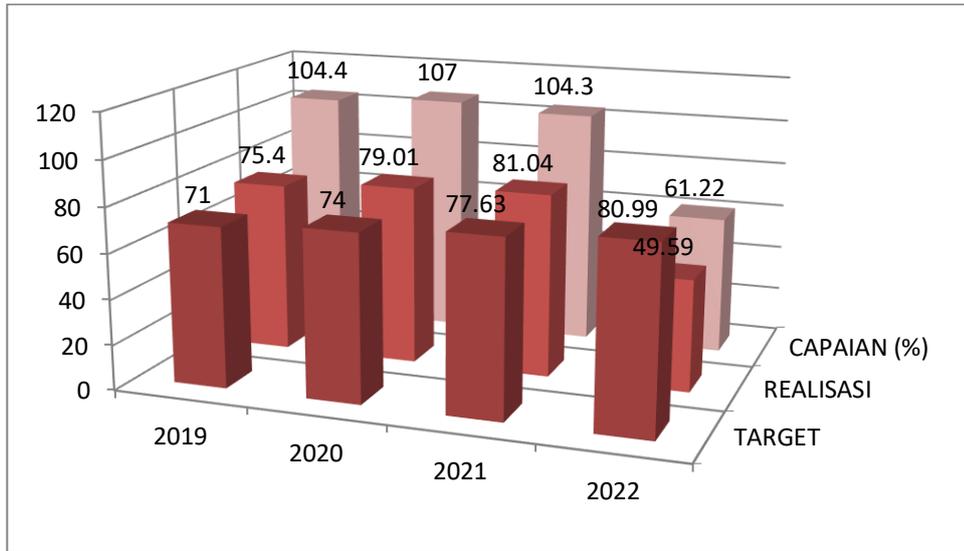
Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif pada tahun 2022 sebesar 49.59% dari target 80.99 Hal ini berarti ada **penurunan** sebesar 43.8% dari tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 81.04% dari target 77.63, dan meningkat terus menerus dari tahun 2020 meningkat 7 % dari target 74% menjadi 79.01%. Tahun 2019 meningkat 04,4% dari target 71% menjadi 75,4%. Hasil perhitungan semakin tinggi semakin baik. Terkait dengan perkembangan/trend realisasi cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif tahun 2019-2022, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini :

Tabel 3.6  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang  
menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	71	75,4	104,4
2020	74	79,01	107
2021	77,63	81,04	104,3
2022	80,99	49,59	61,22

**Gambar 3.2**

Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Peserta KB Aktif Tahun 2019-2022



### Jumlah Unmet Need

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need. Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut *Unmet Need* dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak inginpunya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB.

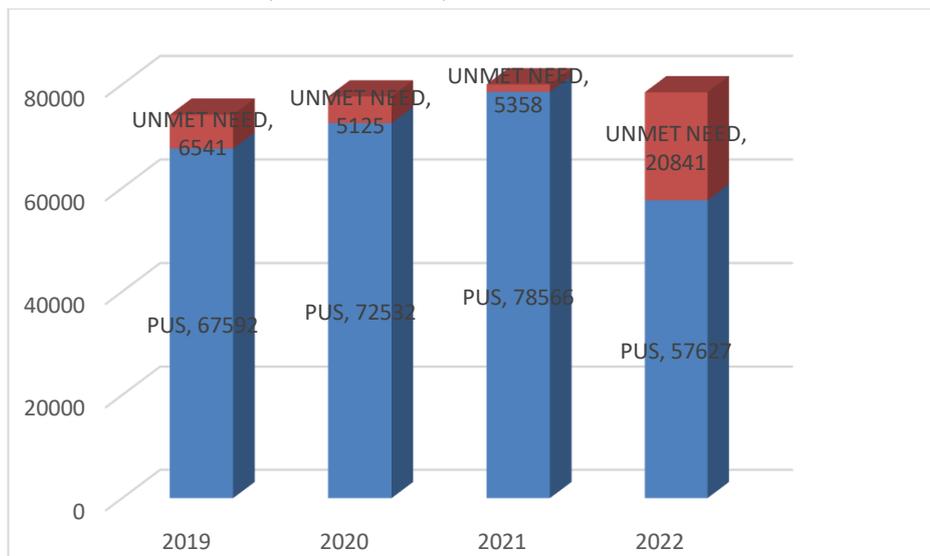
Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

Unmet Need pada tahun 2022 sebesar 20.841 terhadap PUS sebanyak 57.627 dengan capaian penurunan 36,16%. Pada tahun sebelumnya tahun 2021 sebesar 5.358 terhadap PUS sebanyak 72.532 dengan capaian penurunan 7,06% sementara tahun 2020 sebesar 5.125 orang terhadap PUS sebanyak 72.532 orang dengan capaian sebesar 7,06 % dan di tahun 2019 sebesar 6.541 orang terhadap PUS sejumlah 67.592 orang dengan capaian 9,68 %. Hal ini berarti dari tahun ke tahun mengalami penurunan peserta KB yang tidak terlayani karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin menurun maka semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar dibawah ini :

Tabel 3.6  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Sasaran PUS yang  
Belum terlayani (Unmet Need) 2019-2022

TAHUN	PUS	UNMET NEED	CAPAIAN (%)
2019	67.592	6.541	9,68
2020	72.532	5.125	7,06
2021	78.566	5.358	6,08
2022	57.627	20.841	36,16

Gambar 3.3  
Grafik Perkembangan Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani  
(Unmet Need) Tahun 2019-2022



## Jumlah Akseptor KB Baru

**Tabel 3.7**  
**JUMLAH PESERTA KB BARU TAHUN 2022**  
 Kab : POLEWALI MANDAR

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB BARU YANG DIBERI INFORMED CONSENT	JUMLAH PESERTA KB ULANGAN YANG DIBERI INFORMED CONSENT	JUMLAH PESERTA KB ULANGAN YANG DIBERI INFORMED CONSENT
1	2	3=Σ(4-8)	9=Σ(10-14)	9=Σ(10-14)
01	TINAMBUNG	40	299	339
02	CAMPALAGIAN	167	1009	1176
03	WONOMULYO	124	1070	1194
04	POLEWALI	481	831	1312
05	TUTAR	194	765	959
06	BINUANG	182	185	367
07	TAPANGO	74	935	1009
08	MAPILLI	275	787	1062
09	MATANGNGA	173	521	694
10	LUYO	67	213	280
11	LIMBORO	130	444	574
12	BALANIPA	65	281	346
13	ANREAPI	76	700	776
14	MATAKALI	192	366	558
15	ALLU	56	149	205
16	BULO	38	460	498
<b>Jumlah Total</b>		<b>2334</b>	<b>9015</b>	<b>11349</b>

Akseptor KB Baru adalah pasangan usia subur (PUS) yang pertama kali menggunakan kontrasepsi setelah mengalami kehamilan yang berakhir dengan keguguran atau kelahiran.

Akseptor KB baru pada tahun 2022 mencapai 11.349 menalami penurunan 52.576 orang akseptor baru dari tahun sebelumnya tahun 2021 mencapai 63.925 dan di tahun 2020 mencapai 57.311 mengalami kenaikan sebanyak 6.341 akseptor. Tahun 2019 sebanyak 50.970 Akseptor.dan Akseptor KB baru pada tahun 2018 mencapai 43.973 Akseptor. dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan peserta KB Baru tapi untuk tahun 2022 mengalami penurunan. Karena Hasil perhitungan menyatakan **semakin meningkat maka semakin baik**. Tren ini menunjukkan belum maksimalnya program pembinaan dan pelayanan KB di Kecamatan.

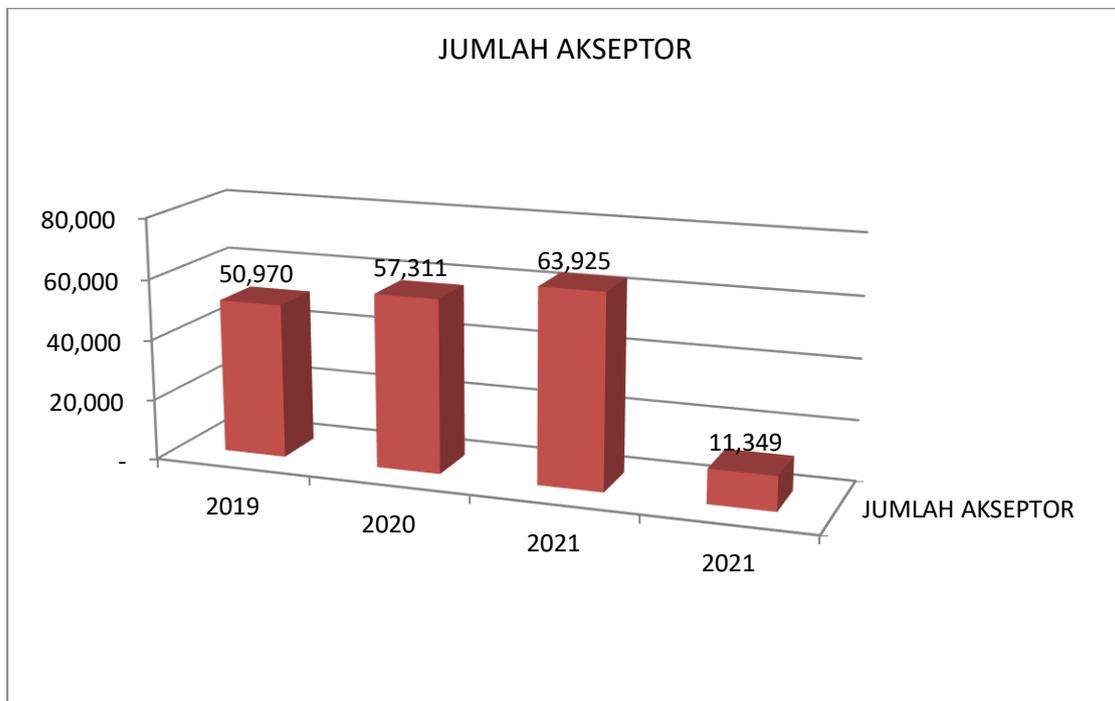
Perkembangan jumlah akseptor KB baru dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut

:

Tabel 3.8  
Perkembangan Jumlah Akseptor KB Baru Terhadap PUS  
Tahun 2019-2022

TAHUN	PUS	AKSEPTOR KB BARU
2019	67.592	50.970
2020	72.532	57.311
2021	78.566	63.925
2022	57.627	11.349

Gambar 3.3  
Grafik Perkembangan jumlah Akseptor  
KB Baru Tahun 2019-2022



**TABEL 3.9**  
**JUMLAH PESERTA KB MKJP TAHUN 2022**  
**KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

No.	KECAMATAN	TOTAL	BARU				ULANGAN			
			IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	IMPLAN	IUD	TUBEKTOMI	VASEKTOMI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	TINAMBUNG	45	2	0	0	1	41	1	0	0
02	CAMPALAGIAN	144	39	13	0	2	68	22	0	0
03	WONOMULYO	249	52	18	0	0	160	18	1	0
04	POLEWALI	529	138	78	0	118	155	21	19	0
05	TUTAR	167	37	0	0	0	130	0	0	0
06	BINUANG	178	80	3	0	0	95	0	0	0
07	TAPANGO	161	8	0	0	0	153	0	0	0
08	MAPILLI	227	83	2	0	2	136	2	2	0
09	MATANGNGA	223	96	1	0	0	126	0	0	0
10	LUYO	145	29	3	0	0	113	0	0	0
11	LIMBORO	98	26	0	0	0	72	0	0	0
12	BALANIPA	37	13	2	0	0	21	1	0	0
13	ANREAPI	164	24	2	0	1	132	5	0	0
14	MATAKALI	150	74	14	0	2	51	8	0	1
15	ALLU	34	7	1	0	2	23	0	1	0
16	BULO	118	16	0	0	0	102	0	0	0
<b>Jumlah Total</b>		<b>2669</b>	<b>724</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>1578</b>	<b>78</b>	<b>23</b>	<b>1</b>

PUS peserta KB aktif MKJP adalah pasangan suami istri yang sah yang istrinya atau suaminya menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Metode Kontrasepsi Jangka Panjang meliputi :

1. MOW (Metode operasi Wanita) atau Tubektomi (tutup kandungan).
2. MOP (Metode Operasi) Pria atau Vasektomi
3. Implan atau Susuk KB dan
4. IUD atau Spiral AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim)

Peserta KB aktif MKJP adalah jumlah peserta KB aktif MKJP dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu di wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif MKJP

adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi MKJP ditambah dengan jumlah peserta KB baru MKJP pada tahun berjalan.

Peserta KB aktif MKJP pada tahun 2022 sebanyak 2.669 orang mengalami penurunan sebanyak 11.487 orang dari tahun sebelumnya di tahun 2021 sebanyak 14.156 dan di tahun 2020 sebanyak 9.490 Akseptor. Pada Tahun 2019 sebanyak 8.028 Akseptor dari tahun sebelumnya 2018 sebanyak 6.393 Akseptor. Hal ini menunjukkan tren kenaikan tapi menunjukkan penurunan di tahun 2022 karena belum maksimalnya Penggerakan dan Penyuluhan di Lini lapangan. Hasil perhitungan angka **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

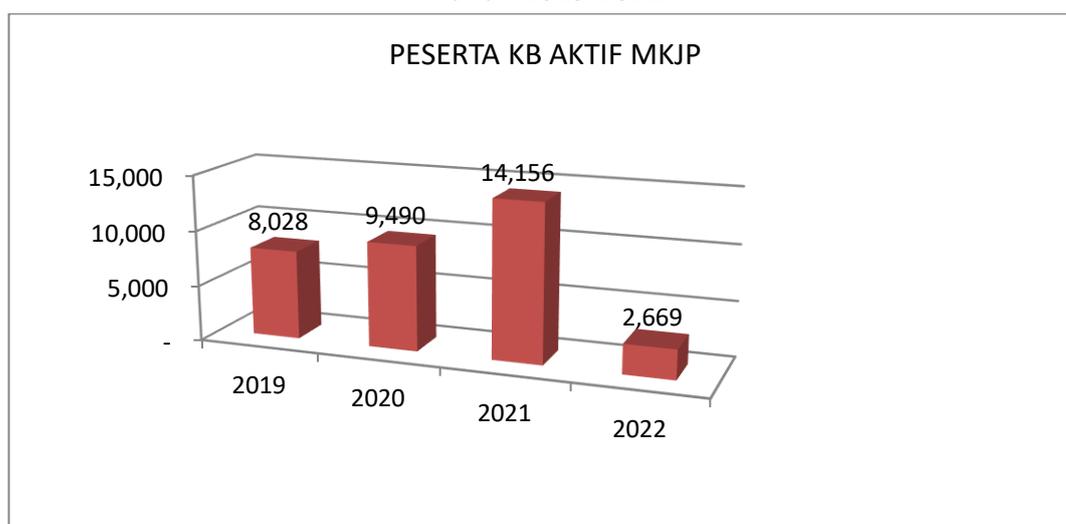
**Tabel 3.10**

Perkembangan Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Terhadap PUS Tahun 2019-2022

TAHUN	PUS	PESERTA KB AKTIF MKJP
2019	67.592	8.028
2020	72.532	9.490
2021	78.566	14.156
2022	57.627	2.669

Gambar 3.4

Grafik Perkembangan Peserta KB Aktif MKJP Terhadap PUS Tahun 2019-2022



### **Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh KB (PLKB/PKB)**

PLKB/PKB adalah petugas BKKBN berkedudukan di tingkat lini lapangan yang menjadi andalan terdepan dalam mewujudkan keberhasilan Program Bangga Kencana (KKBPK).

Masing-masing bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan dan memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana bersama institusi masyarakat pedesaan/perkotaan di tingkat desa/kelurahan.

Status kepegawaian PKB/PLKB dapat dianalogikan sebagai orang yang pergi dan pulang (PP). Semula berstatus sebagai pegawai pusat (vertikal) dan setelah adanya otda maka jabatan ini masuk dalam formatur PNS Pemkab tetapi sejak tahun 2017 statusnya dikembalikan ke PNS Pusat dibawah naungan BKKBN

PLKB yang ada di daerah/Kabupaten, diberdayakan sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Dinas P2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar. PKB/PLKB ini mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB di Lapangan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan penggerakan di lapangan ini dilaporkan ke Pusat melalui BKKBN Perwakilan provinsi Sulawesi Barat.

Jumlah tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten polewali Mandar sudah cukup memadai semenjak awal tahun ditambah sebanyak 66 orang PLKB dari Formasi PLKB PPPK Pengangkatan tahun 2021 jadi total PLKB yang ada di Polewali mandar saat ini adalah 82 orang

Kurangnya tenaga penyuluh KB sudah berlangsung sejak dimulainya era desentralisasi pada tahun 2003. Saat itu, penyuluh KB di Indonesia mencapai 26 ribu. Namun, saat ini hanya 15 ribu orang.

Jumlah desa dan Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar adalah 167 sementara PLKB sekarang sejumlah 82 orang. Dari jumlah tersebut sudah bisa dikatakan bahwa rasio 1:2 telah mencukupi untuk Kabupaten Polewali Mandar.

Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2022 di semua wilayah kerja Kecamatan sudah terisi Koordinator PLKB sehingga yang jumlahnya 16 orang. Dengan Asumsi bahwa setiap penyuluh KB membawahi 2 Desa/kelurahan sudah mencukupi rasio petugas KB di kabupaten Polewali Mandar dengan jumlah desa dan kelurahan sebanyak 167.

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (KB)**  
**di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2022**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	PPLKB/Koordinator	16	15	16	16
2	PKB/PLKB	4	5	7	66
Jumlah		<b>23</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>82</b>

Tabel 3.12  
**Jumlah Tenaga Penyuluh KB Menurut Kecamatan**  
**di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2022**

No.	Kecamatan	2019		2020		2021		2022	
		Jml Koordinator	Jml PKB/ PLKB	Jml Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB	Jml Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB	Jml Koordinator	Jumlah PKB/ PLKB
1	Tinambung	1	1	1	1	1	1	1	3
2	Balanipa	1	.....	1	.....	1	1	1	4
3	Limboro	1	.....	1	.....	1	.....	1	4
4	Tubbi Taramanu	1	.....	1	.....	1	.....	1	2
5	Alu	1	.....	1	.....	1	.....	1	3
6	Campalagian	1	.....	1	1	1	1	1	7
7	Luyo	1	.....	1	.....	1	.....	1	4
8	Wonomulyo	1	1	1	.....	1	1	1	7
9	Mapilli	1	1	1	.....	1	1	1	6
10	Tapango	1	.....	1	.....	1	.....	1	6
11	Matakali	1	.....	1	.....	1	.....	1	2
12	Polewali	1	1	1	1	1	1	1	4
13	Binuang	1	1	1	.....	1	1	1	5
14	Anreapi	1	.....	1	.....	1	.....	1	2
15	Matangnga	1	.....	1	.....	1	.....	1	3
16	Bulo	1	.....	1	.....	1	.....	1	4
Kab. Polewali Mandar		<b>16</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	16	7	16	66

## Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera 1

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs). Indikator tahapan KS I atau indikator *kebutuhan dasar keluarga* (basic needs), yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga *makan dua kali* sehari atau lebih, (2) Anggota keluarga memiliki *pakaian yang berbeda* untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai *atap, lantai dan dinding* yang baik, (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa *ke sarana kesehatan*, (5) Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi *ke sarana pelayanan kontrasepsi* dan (6) *Semua anak umur 7 – 15 tahun* dalam keluarga *bersekolah*. Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak mampu memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator KS II atau indikator *kebutuhan psikologis* (psychological needs) keluarga. Indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator *kebutuhan psikologis* (psychological needs) keluarga, yaitu : (1) Pada umumnya anggota keluarga *melaksanakan ibadah* sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga *makan daging/ikan/telur*, (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang *satu stel pakaian baru* dalam setahun, (4) *Luas lantai rumah* paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah, (5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam *keadaan sehat* sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing, (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang *bekerja untuk memperoleh penghasilan*, (7) Seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun *bisa baca tulisan latin*, (8) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih *menggunakan alat/obat kontrasepsi*.

BKKBN hanya melaksanakan pendataan pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Tidak melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi kemiskinan atau menurunkan persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1. Melakukan pemantauan terhadap pendataan keluarga dan pelatihan bagi pendata (PPKBD/Sub PPKBD), hal yang diambil sehingga pendataan menghasilkan data yang akurat.

Kendala-kendala tersebut Pembangunan Bangsa Kencana di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai berikut :

- a. Peserta KB aktif dari tahun ke tahun masih didominasi perempuan, kesertaan ber-KB laki-laki masih kurang;
- b. Peserta KB aktif untuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih kurang;
- c. Kurangnya advokasi, konseling dan penyuluhan tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- d. Kurangnya tenaga terlatih untuk kontrasepsi MKJP;
- e. Kurangnya kualitas dan kuantitas Penyuluh KB;

Langkah-langkah yang diambil oleh DP2KBP3A, adalah :

- Melakukan advokasi melalui motivator KB pria.  
Motivator KB pria merupakan seseorang yang telah menjadi peserta KB pria yaitu vasektomi. Motivator tersebut mengajak orang lain untuk ikut dengan menceritakan pengalaman yang dirasakan setelah di vasektomi.  
Akhirnya, pada tahun 2018, Kabupaten Polewali Mandar menjadi Terbaik I pencapaian KB Pria melalui Vasektomi terbanyak di Kecamatan Tutar dan Luyo Motivator KB Pria Terbaik.
- Melakukan pelayanan gratis baik secara mobile (melalui mobil pelayanan) maupun statis di puskesmas dan pengadaan alat kontrasepsi MKJP;
- Melakukan advokasi melalui pemutaran film tentang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB);
- Melakukan advokasi dan penyuluhan bahwa program KB bukan hanya alat kontrasepsi atau kuantitas penduduk tetapi juga menyangkut kualitas penduduk melalui pembangunan keluarga;
- Mengusulkan bidan atau dokter untuk mengikuti pelatihan pemasangan alat kontrasepsi khususnya MKJP;
- Guna mengantisipasi kurangnya penyuluh KB, maka diangkat PLKB Sukarela dan untuk meningkatkan kualitasnya diikutkan LDT (Latihan Dasar Tehnis) khusus Non PNS yang dilaksanakan oleh BKKBN Perwakilan Sulawesi Barat

### KEGIATAN OPERASIONAL TIM KB KELILING (TKBK)

**Gambar 3.5**

Tim KB Keliling Kabupaten Polewali Mandar



TKBK merupakan suatu kegiatan dalam bentuk pelayanan KB secara gratis kepada warga dan menjadi salah-satu upaya jitu mengendalikan tingkat kelahiran penduduk. Dalam pelayanannya, DP2KBP3A menyediakan secara gratis alat KB berupa pemasangan pemasangan Intra Uterin Device (IUD), Implant / Susuk KB, Suntik dan Pil. Dalam kegiatan itu pula diberikan pemahaman mengenai perencanaan keluarga secara baik. Perencanaan keluarga ditujukan agar keluarga dapat menjadi keluarga sejahtera dan masing-masing anak mendapat perhatian serta kasih sayang yang seharusnya dari orangtua.

Penggunaan alat kontrasepsi turun sampai 47 persen selama pandemi. Kondisi itu dapat membuat angka kehamilan yang tidak direncanakan meningkat sehingga terjadi ledakan penduduk. Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN) menyebut, dibanding tahun 2019, terjadi penurunan lebih dari satu juta layanan Keluarga Berencana (KB) selama Januari – Desember 2022. Itu sebabnya, masa normal baru setelah meredanya pandemi seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali pelayanan KB. “Pemerintah sudah berkomitmen menggencarkan kembali program KB untuk menurunkan angka kelahiran sehingga penduduk Indonesia tumbuh seimbang. Namun, selama pandemi kita melihat penurunan partisipasi KB cukup besar,” kata Kepala BKKBN, dr.Hasto Wardoyo Sp.OG (K) dalam acara webinar “Urgensi Pelayanan KB pada Masa New Normal”. Pandemi Covid-19 sangat berdampak terhadap pelaksanaan program KB yang selama ini mengandalkan kegiatan tatap muka dalam sosialisasi, penyuluhan, dan pemberian layanan kontrasepsi.

Selama masa pandemi muncul kekhawatiran masyarakat untuk mengakses pelayanan KB di klinik bidan (Bidan Praktek Mandiri) atau dokter yang ada di Klinik KB yang tersebar diseluru wilayah. Di bawah ini adalah uraian pelayanan Operasional TKBK di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan frekwensi di Masa Pandemi tahun 2022

**Tabel 3.13**  
Frekwensi Operasional Tim KB Keliling  
Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(5)
1	Frekuwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota	0	0	0	0
2	Frekwensi Rakor Program KB Tingkat Desa/Kabupaten	16	15	15	16
3	Frekuwensi Rakor program KB tingkat Kabupaten/Desa	140	123	123	123
4	Frekwensi penyuluhan oleh PLKB/PKB	143	134	143	134
5	Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KB	130	118	107	118
6	Jumlah tokoh masyarakat/agama/adat yang aktif membuka KIE KB	34	27	40	27
7	Frekuwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/kelurahan	100	82	62	82
8	Frekuwensi Operasional <b>Gerak Muyan KB</b> dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan	0	0	0	0

## **Pembinaan TRIBINA**

Pembinaan ketahanan keluarga berbasis Tribina yaitu BKB, BKR, BKL dikampung kb yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Polewali Mandar. Pembinaan atau sosialisasi kelompok tribina bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kader tentang tribina yang meliputi Bina Keluarga balita, bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia dimana acara ini berlangsung menjelaskan tentang tujuan, fungsi dan manfaat dari dibentuknya tribina tersebut. dan diharapkan para kader memahami bagaimana mengisi data dalam buku tribina dan dapat memberikan penyuluhan dengan baik serta tepat sasaran.

Adapun kegiatan ini memberikan informasi kepada kader-kader tribina, diantaranya nya :

BKB : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKB

BKR : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKR

BKL : menjelaskan tugas dan fungsi kader BKL

Dengan demikian para peserta dan kader dapat mengetahui secara rinci tentang kegiatan tribina dan dapat membantu bekerjasama dalam kegiatan program KB.

### **1. Cakupan sasaran anggota bina keluarga balita (BKB) ber-KB**

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Upaya ini disebabkan karena meningkatnya pembinaan dan antusiasme kader dikalangan bawah sampai di desa dan tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dan cenderung stagnan disebabkan oleh Inflasi. lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel. 3.14**  
Perkembangan Target dan Realisasi Cakupan Anggota Bina  
Keluarga Balita ber-KB Tahun 2019-2022

**I. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKB**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	5326	3521	5321	5317
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	4262	4262	4249	4249
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	3330	3330	3330	3339
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	3655	3655	3655	3655
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	2883	2783	2783	2783
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	3223	3248	3248	3228
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	2533	2433	2433	2433
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	88	90	88	88
9	Jumlah anggota yang menjadi anggota kelompok kegiatan BKB yang menggunakan KAA	2078	2002	2002	2045

**Sasaran anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB**

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan keluarga dan anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orangtua dan anak remaja, baik secara fisik, intelektual, kesehatan reproduksi, mental emosional, sosial dan moral spritual.

Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama.

Dengan adanya pengembangan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.

Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Biasanya kegiatan ini dilakukan selama sebulan sekali untuk diberikan pendidikan, pelatihan dan pengetahuan seputar permasalahan dan cara mengatasi permasalahan remaja.

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKR terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Tahun 2022 belum ada peningkatan sama sekali dan terlihat Stagnan dengan tahun 2021 yang mengalami peningkatan yang bagus karena capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2020 dan 2019. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang semakin tinggi semakin baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel. 3.15**  
Perkembangan Anggota Bina Keluarga Remaja  
ber-KB Tahun 2019-2022

**II. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKR**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(1)	(2)				(3)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	1129	1144	1144	781
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	693	693	693	423
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	445	445	445	290
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	595	595	595	362
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	524	523	523	314
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	500	488	488	340
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	454	454	454	307
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	17	17	17	15

**3. Sasaran anggota bina keluarga lansia (BKL) ber-KB**

Bina Keluarga Lansia atau BKL merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Pengetahuan ini meliputi pola perawatan, pengasuhan, dan pemberdayaan kaum lansia agar kesejahteraannya bisa meningkat.

BKL mempunyai dua sasaran, yaitu sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran langsungnya adalah keluarga yang mempunyai lansia atau keluarga yang semua anggotanya merupakan kaum lansia. Sedangkan sasaran tidak langsungnya, yang pertama adalah perorangan seperti guru, ulama atau pemuka agama, tokoh adat, pemuda, pemimpin organisasi dan para ahli yang memiliki ketrampilan di bidang psikolog, perawatan,

kebidanan, dan dokter. Kemudian, yang kedua adalah lembaga pemerintah maupun swasta, seperti sekolah, organisasi perempuan, dan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pembinaan anggota kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKL terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok. Pada tahun 2021 ini jumlah anggota BKL mengalami **penurunan drastis** dari tahun sebelumnya di tahun 2020 penurunan ini disebabkan kurang optimalnya penyuluhan ditingkat kecamatan yang belum jelas penyebabnya. Tapi tahun 2020 capaiannya melampaui dari tahun sebelumnya di tahun 2019 dan 2018. Karena asumsinya mengatakan perkembangan yang **semakin tinggi semakin baik**. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 3.16**

Perkembangan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB Tahun 2018-2022

**III. Pembinaan Ketahanan Keluarga BKL**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	1567	1567	1380	1084
2	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan	1300	1315	1128	856
3	Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan	590	590	580	407
4	Jumlah kelompok anggota kegiatan yang berstatus PUS	936	940	832	627
5	Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS dan KS I	788	795	730	556
6	Jumlah PUS kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB	835	824	727	585
7	Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi peserta KB KPS dan KS I	705	677	612	529
8	Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan	18	18	18	18

#### IV. PEMBINAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA (UPPKA)

**Gambar 3.6**

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA



**UPPKA** adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga Akseptor yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan Keluarga Sejahtera, baik Pasangan Usia Subur yang sudah ber-KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan dan memantapkan.

##### **Tujuan UPPKA:**

1. Mengajak keluarga aktif bergerak dalam ekonomi produktif
2. Mensosialisasikan pengelolaan keuangan keluarga
3. Meningkatkan ketahanan dan kemandirian keluarga
4. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

##### **Anggota UPPKA:**

1. Pasangan Usia Subur (PUS)
2. Peserta Keluarga Berencana (KB)
3. Remaja
4. Lanjut usia

Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat berupaya mendukung, mengajak, memfasilitasi dan mendampingi para anggotanya dalam memanfaatkan segala sumber daya lokal (bahan baku, keahlian / kemampuan anggota, permintaan pasar, sumber pembiayaan dan lain-lain) untuk kegiatan pembelajaran serta meningkatkan kegiatan ekonomi produktif.

Pembinaan PUS peserta KB menjadi anggota usaha peningkatan dan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKA) pada tahun 2022 ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya di tahun 2021. Ini sepertinya tidak adanya upaya sama sekali PLKB dalam meningkatkan capaian padahal segala macam sarana dan prasarana telah disiapkan dan tinggal di aplikasikan. Penurunan terjadi sejak tahun sebelumnya di tahun 2020 dan 2019 karena Pandemi Covid19 tapi dengan membaiknya situasi diharapkan akan meningkat ditahun tahun mendatang tetapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Untuk perkembangannya bisa dilihat di table berikut ini.

**Tabel. 3.17**  
Perkembangan Pembinaan PUS Peserta KB  
Menjadi Anggota UPPKA Tahun 2019-2022

NO	URAIAN	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anggota yang menjadi kelompok UPPKA :				
	a. Jumlah anggota kelompok UPPKA	855	838	838	720
	b. Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KSI	674	659	659	630
2	Status KB anggota kelompok UPPKA:				
	a. Anggoa dari seluruh anggota tahapan KS				
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKA yang status PUS	572	552	552	540
	2) Jumlah anggota kelompok UPPKA yang status PUS ber KB	433	415	415	405
	b. Anggota dari tahapan KPS dan KSI				
	1) Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KSI yang status PUS	469	451	451	437
2) Jumlah anggota kelompok UPPKA KPS dan KSI yang status PUS ke KB	357	340	340	328	
3	Jumlah pertemuan anggota UPPKA	26	22	22	27

### **Pembinaan PUS berusia < 20 tahun (PUSMUPAR)**

Pasangan Usia Subur Muda Paritas Rendah adalah pasangan suami istri yang usia istrinya antara 15 - 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga ) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun (PUSMUPAR) , antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang istrinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil suatu daerah dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang istrinya berusia dibawah 20 tahun. Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan

adalah jika proporsi PUS yang usia istrinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 5,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Cakupan PUS yang usia istrinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah.

Ini juga disebabkan karena kurangnya upaya advokasi dan KIE program KKB oleh petugas lapangan KB.

### Kelompok PIK Remaja

**Gambar 3.7**

Pusat Informasi Konseling Remaja



Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) adalah suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Tujuan umum dari PIK Remaja adalah untuk memberikan informasi PKBR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling dan rujukan PKBR. Disamping itu, juga dikembangkan kegiatan-kegiatan lain yang khas dan sesuai minat dan kebutuhan remaja untuk mencapai Tegar Remaja dalam rangka tegar Keluarga guna mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Ruang lingkup PIK Remaja meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi KRR, Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat remaja.

PIK Remaja dapat melayani remaja lainnya yang berada di luar lokasi wilayah administrasinya. PIK Remaja dalam penyebutannya bisa dikaitkan dengan tempat dan

institusi pembinaanya seperti PIK Remaja Sekolah, PIK Remaja Masjid, PIK remaja Pesantren, dan lain-lain. Pengelola PIK Remaja adalah pemuda/remaja yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Remaja serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau yang sejenis. Pengelola PIK Remaja terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik sebaya dan konselor sebaya.

### **Kelompok PIK Mahasiswa**

Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK-Mahasiswa) adalah suatu wadah kegiatan program KKB yang dikelola dari, oleh dan untuk mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang Kependudukan dan Keluarga Berencana termasuk Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Tujuan umum dari PIK Mahasiswa adalah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi mahasiswa. Sedangkan tujuan khususnya antara lain: 1) membentuk Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) di kampus; 2) meningkatkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) dari tahap Tumbuh menjadi tahap tegak dan tahap Tegar; serta 3) Mengembangkan Pusat Informasi dan Konseling Mahasiswa (PIK Mahasiswa) sebagai pusat unggulan (center of excellence) Ruang lingkup PIK Mahasiswa meliputi aspek-aspek kegiatan pemberian informasi PKBR, TRIAD KRR (Seksualitas, Npsza, HIV dan AIDS), Pendewasaan Usia Perkawinan, Keterampilan Hidup (Life Skills), pelayanan konseling, rujukan, pengembangan jaringan dan dukungan, serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sesuai dengan ciri dan minat mahasiswa.

Pengelola PIK Mahasiswa adalah mahasiswa yang punya komitmen dan mengelola langsung PIK Mahasiswa serta telah mengikuti pelatihan dengan mempergunakan modul dan kurikulum standard yang telah disusun oleh BKKBN atau pihak lain. Pengelola PIK Mahasiswa terdiri dari Ketua, Bidang Administrasi, Bidang Program dan Kegiatan, Pendidik Sebaya, dan Konselor Sebaya.

**Tabel. 3.18**

Realisasi Anggaran dan Capaian Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Terkendalinya  
Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peserta KB Aktif Tahun 2022

<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Capaian (%)</b>
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana</b>	<b>7.408.297.000</b>	<b>6.674.685.225</b>	<b>90,10</b>
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	7.408.297.000	6.674.685.225	90,10
<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	25,000,000	25,000,000	100

Walaupun sebagian besar indikator di sasaran 2 ini telah melampaui target, tetapi masih ada kendala-kendala yang dihadapi, sebagai berikut :

1. Kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS sulit berkembang karena kekurangan dana pembinaan terkhusus insentif untuk kader;
2. Pusat Informasi Konseling Remaja atau Mahasiswa (PIK R/M) juga masih sulit untuk berkembang malahan sebagian besar kurang aktif atau bahkan sudah tidak aktif;
3. Pernikahan Usia Anak masih tinggi yang berarti pendewasaan usia pernikahan belum terlalu dipahami oleh masyarakat.

Hal-hal yang dilakukan untuk menghadapi permasalahan dan kendala-kendala, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kerjasama dan dukungan dari stakeholder atau instansi terkait mulai dari tingkat Desa dan Kabupaten;
- Mengintegrasikan program dan kegiatan yang berkaitan dengan instansi terkait;
- Melakukan pembinaan dan pelatihan bagi kelompok dan kader;
- Selain itu, upaya dilakukan untuk mencegah pernikahan dini, yaitu melalui: (1) Peningkatan akses informasi tentang pendewasaan usia pernikahan, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif

remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG) dengan melakukan koordinasi, penyusunan kebijakan dan pedoman, advokasi, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk fasilitasi lainnya, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu, PUG dilakukan melalui perencanaan dan kebijakan berperspektif gender organisasi dan institusi. Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yaitu : pendampingan penganggaran dan perencanaan responsif gender (PPRG) ke SKPD dan pelaksanaan evaluasi PUG untuk mengetahui sejauhmana kelembagaan PUG telah memenuhi prasyarat PUG guna predikat Kabupaten peraih “Anugerah Parahita Ekapraya (APE)”

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator program/kegiatan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021 Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel. 3.19**  
Indikator Capaian Kinerja Membaiknya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Capaian IPG	92.54%	92.02	99,43

Bidang yang bertugas untuk mewujudkan sasaran 2.1 adalah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Uraian indikator kinerja untuk mencapai sasaran membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender adalah sebagai berikut:

**1. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

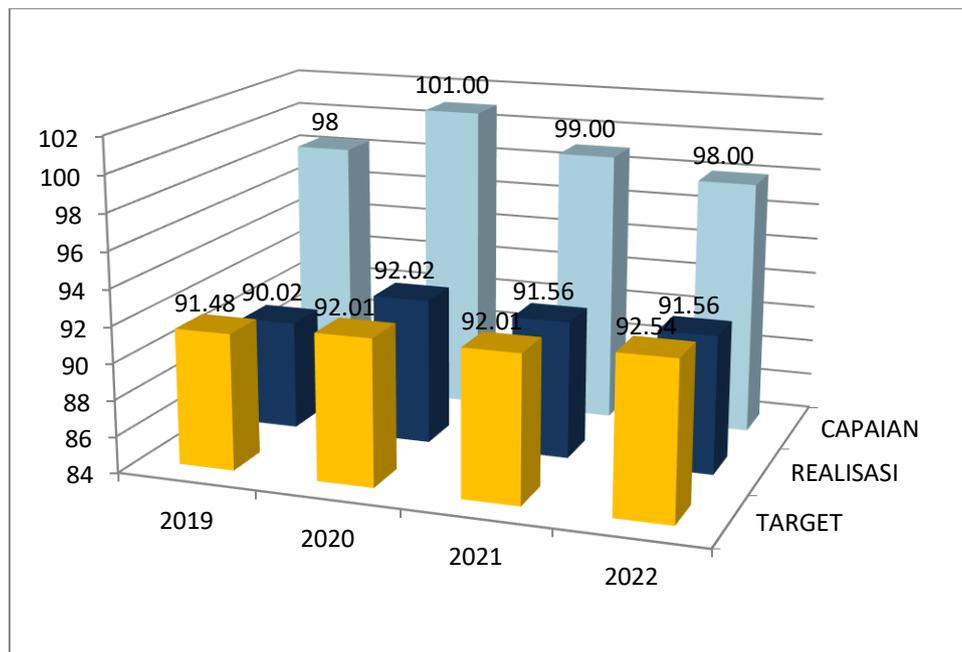
IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Capaian IPG Kabupaten Polewali Mandar. Pada tahun 2022 ini, target 92,54% realisasi 92,02% capaian

99,43%. Data ini diperoleh dan diolah oleh BPS Pusat dengan menggunakan sistem atau aplikasi. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

**Tabel. 3.20**  
 Perkembangan Target dan Realisasi Capaian  
 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2018-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2019	91,48	90.02	98,40
2020	92,01	92.02	101
2021	92,01	92.02	101
2022	92,54	92.02	99,43

**Gambar 3.8**  
 Grafik Perkembangan Target dan Realisasi Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)  
 Tahun 2019-2022



Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah kurangnya data pendukung dan pengetahuan dalam menghitung, sehingga menunggu data dari BPS.

Langkah-langkah yang ditempuh DP2KBP3A khususnya bidang Pemberdayaan Perempuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, yaitu memfasilitasi unit layanan terpadu (P2TP2A), melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan, koordinasi dengan stakeholder, sosialisasi dan advokasi.

## PREDIKAT KABUPATEN LAYAK ANAK

**Gambar 3.9**  
Predikat kabupaten Layak Anak



Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak

Tujuan Secara Umum: Untuk memenuhi hak dan melindungi anak dan tujuan secara khusus adalah Untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Prinsip dalam Pengembangan KLA

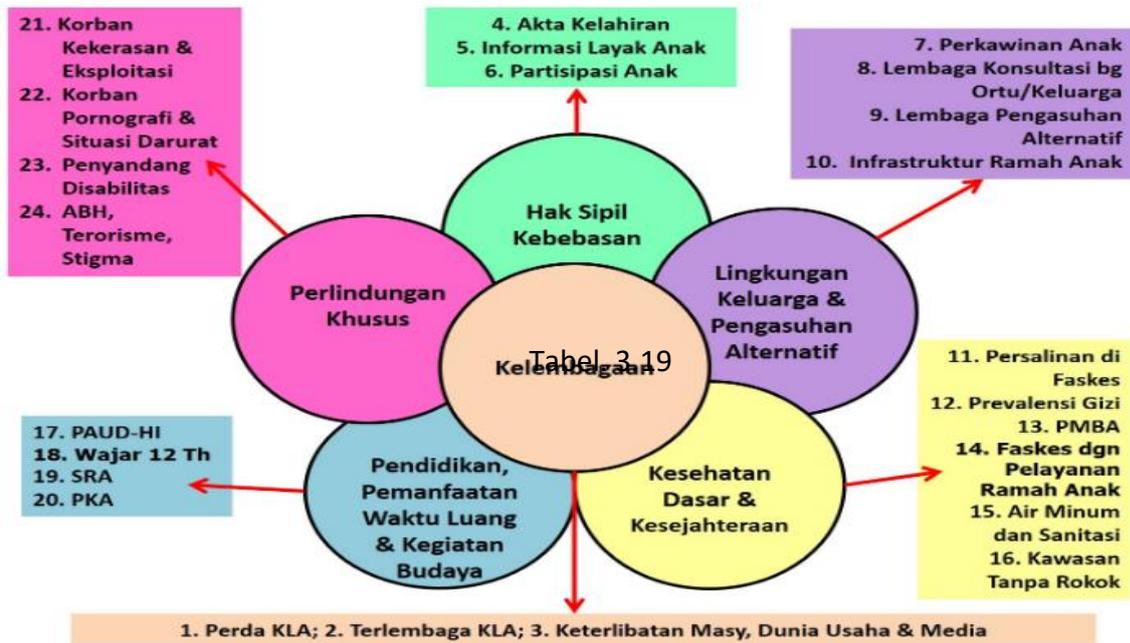
- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik untuk anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Tata Pemerintahan Yang baik

Strategi Pengembangan KLA

KLA menerapkan strategi pemenuhan hak anak (PUHA), yang berarti melakukan pengintegrasian hak-hak anak ke dalam:

- a. Setiap proses penyusunan: kebijakan, program dan kegiatan.
- b. Setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. Setiap tingkatan wilayah: nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.

**Gambar 3.10**  
Aspek Pemenuhan Kabupaten Layak Anak



**Tabel 3.21**  
Pencapaian Indikator Sasaran Predikat Kabupaten Layak Anak (KLA)  
Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Predikat Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	100

**Gambar 3.11**  
Gambar Tingkatan Indikator Kabupaten Layak Anak



Cakupan pelayanan kesehatan adalah jumlah korban KtP/A yang memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas dan/atau di RS. Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A adalah Puskesmas yang mempunyai minimal 2 orang tenaga kesehatan terlatih. Rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu adalah rumah sakit yang mempunyai minimal 3 orang tenaga kesehatan terlatih.

Jumlah korban kekerasan anak yang mendapat layanan kesehatan di tahun 2022 ini adalah sejumlah 46 Kasus meningkat 4 kasus dari tahun sebelumnya tahun 2021 sejumlah 42 kasus dan di tahun 2020 dan tahun 2019 sejumlah 54 Kasus dan tahun 2018 sejumlah 90 Kasus Anak. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan ditingkat kriminalitas terhadap Anak sementara diharapkan bahwa kasus kekerasan anak ini dapat turun dari tahun ke tahun dengan adanya pendampingan dari Bidang PPPA. Dari semua Kasus Anak yang ada dapat diselesaikan semua tanpa hambatan berkat kerja sama yang baik antar petugas P2TP2A. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 3.22**

Tingkat Kasus Kekerasan Anak Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	54
2	2020	37
3	2021	42
4	2022	46

**Gambar 3.12**

Grafik Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2019-2022



Dalam upaya pencapaian target indikator membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak , yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan, seperti pada tabel berikut :

**Tabel. 3.23**

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Pencapaian Indikator Membaiknya Indeks Pembangunan Gender dan Predikat Kabupaten Layak Anak serta meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak Tahun 2022

Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Program Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>239,240,000</b>	<b>239,075,300</b>	<b>99,93</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	15.000.000	15.000.000	100
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	20,000,000	19,965,100	99,83
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	204,240,000	204,110,200	99,94
<b>Program Perlindungan Anak</b>	<b>180,000,000</b>	<b>179,965,000</b>	<b>99,98</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	49,965,000	99,93
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	130,000,000	130,000,000	100
	<b>419240000</b>	<b>419,040,300</b>	<b>99,95</b>

#### 5. Sasaran 5 : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu tuntutan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, Setjen Wantannas secara rutin melakukan survey untuk melihat aspek kepuasan masyarakat terutama mengenai kualitas layanan yang diberikan oleh Setjen Wantannas. Hal ini sejalan dengan amanat yang tertera pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme survey berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat, dalam hal ini para stakeholder Setjen Wantannas dalam

memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Pelaksanaan survey IKM yang dilaksanakan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas yang merupakan langkah rutin dalam menjaga kualitas mutu pelayanan publik. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan public.

Untuk Kabupaten Polewali Mandar di tahun 2022 ini mendapat IKM dengan Prestasi **BAIK**

#### 6. Sasaran 6 : Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Instansi kerja pemerintah. Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang ada pada Perangkat Daerah. Data dari luar Perangkat Daerah juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh agar tindakan perbaikan dapat segera dilakukan. Berbeda dengan audit, evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/ rekomendasi perbaikan. Sifat evaluasi lebih persuasif, analitik dan memperhatikan kemungkinan penerapannya.

Tujuan evaluasi implementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Kabupaten Polewali mandar di Tahun 2022 mendapatkan nilai **BB** dalam penilaian Sakip dari Target yang ditetapkan yaitu Nilai **BB**

## 7. Sasaran 7 : Opini Pengelolaan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Di tahun 2022 ini Kabupaten Polewali mandar mendapatkan Opini Audit **WTP** (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK sesuai dengan target yang dicanangkan

## B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagaimana dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Alokasi anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2022 adalah :

- Belanja Tidak Langsung	: Rp. 1.992.462.698,-
- Belanja Langsung	: Rp. 8.199.338.400,-
<b>Total</b>	<b>: Rp. 10,191,801,098,-</b>

Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar tahun 2022, dapat dilihat dari uraian dan tabel per sasaran berikut :

**Tabel. 3.24**

Akuntabilitas Keuangan Sasaran Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2022

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesehatan Reproduksi</b>					
<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>					
Prosentase Peserta KB Aktif	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah dan Jenis Layanan program KKBPK yang dilaksanakan PKB/PLKB	7.408.297.000	6.674.685.225	90,10
<b>Sasaran 2 : Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk</b>					
<b>Program Peningkatan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk</b>					
Laju Pertumbuhan Penduduk	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Sekolah yang diberikan sosialisasi	25,000,000	25,000,000	100
<b>Jumlah</b>			<b>7.433.297.000</b>	<b>6.699.685.225</b>	<b>90,13</b>

Dari tabel di atas, dijelaskan bahwa untuk mencapai target indikator sasaran pada sasaran 1 yaitu mencapai indikator Persentase KB Aktif dijabarkan kedalam 1 program dan 1

kegiatan dengan besar anggaran Rp. 7.408.297.000,- dan realisasi Rp. 5,769,254,464,- capaian 90,10%, yaitu : **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** meliputi :

1. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

Untuk mencapai indikator Laju Pertumbuhan Penduduk, dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 25,000,0000,- dan realisasi Rp. 25,000,000,- capaian 100 %, yaitu : **Program Pengendalian Penduduk** meliputi :

1. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal

Akuntabilitas Keuangan untuk sasaran 3. Menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.25

Akuntabilitas Keuangan Sasaran Menurunnya kasus kekerasan terhadap PA dan meningkatnya pembangunan dan Pemberdayaan gender Tahun 2022

Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dan meningkatnya Kualitas Hidup Anak</b>					
<b>Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak</b>					
IPG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah peserta evaluasi PUG	15,000,000	15,000,000	100
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG	20,000,000	19,965,100	99,83
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada	Jumlah lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	204,240,000	204,110,200	99,94

	Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/kota			
Predikat Kabupaten Layak Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Forum anak	130,000,000	130,000,000	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang difasilitasi	50,000,000	49,965,000	99,93
<b>Jumlah</b>			<b>419,240,000,-</b>	<b>419,040,300,-</b>	<b>99,00</b>

Untuk mencapai indikator IPG dan Predikat Kabupaten Layak Anak, dijabarkan dalam 1 program dan 5 kegiatan dengan besar anggaran Rp. 419,240,000,- dan realisasi Rp. 419,040,300,-capaian 99,00%, yaitu :

**1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**

Kegiatan : Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUGtermasuk PPRG

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan

Kabupaten/Kota

2. **Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)** meliputi Sub Kegiatan :

Kegiatan : Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misidan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan **good governance**. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabarandari visi, misi danstrategi instansipemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas ini disusun berdasarkan kebijakan umum anggaran (KUA) Tahun anggaran 2022 merupakan media komunikasi pertanggung jawaban atas pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2022. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feedback*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Penetapan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) tahun 2022 ditetapkan sebanyak 4 sasaran dengan 7 indikator kinerja, dengan kategori capaian sebagai berikut :

#### **a) 7 indikator mencapai target;**

Alokasi dana APBD DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 guna mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran sebesar Rp. 7.783.504.908,- terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 791.041.400,- dan Belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.992.462.698,- dan direalisasikan sebesar Rp. 2.702.864.272 atau 92,01 %

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja DP2KBP3A tahun 2022 antara lain :

- Keterbatasan pengetahuan pegawai DP2KBP3A terkhusus eselon II dan III tentang penetapan kinerja OPD;
- Keterbatasan anggaran sehingga sebagian kegiatan untuk pencapaian beberapa indikator kinerja disatukan/digabung;
- Untuk penyediaan data bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunggu data dari OPD terkait dan BPS;

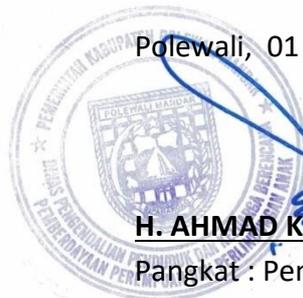
- Kurangnya koordinasi baik secara internal antar bidang maupun dengan OPD terkait.  
Adapun yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja DP2KBP3A tahun 2022, sebagai berikut :
- Menyarankan jangan hanya bagian perencanaan OPD saja disosialisasikan tentang penetapan kinerja tetapi disosialisasikan juga kepada Kepala OPD dan Kepala Bidang/Sekretaris DP2KBP3A selaku pelaksana dan penentu target indikator kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Mengefisienkan anggaran dengan menyatukan dan menggabung beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian beberapa target indikator;
- Terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait baik secara lisan maupun tulisan guna memperoleh data terkait bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Melaksanakan pertemuan secara intern guna membahas tentang penetapan kinerja dan secara eksternal dengan stakeholder terkait guna mendapat informasi dan data yang terkait.

**Saran**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur Bidang Pengendalian Penduduk, Penggerakan dan Penyuluhan, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.

emikianlah, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) ini dibuat. Semoga LAKIP DP2KBP3A Tahun 2022 bermanfaat terutama bagi aparat DP2KBP3A sendiri. Sekian dan Terima Kasih.

Polewali, 01 Maret 2023



**H. AHMAD KILANG, S.Pd. MMA**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19681231 198803 1 190